BRAWIJAYA

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP MANAJEMEN LABA

(STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> LUCKY BERLIANA OVIANTI NIM. 145030201111062



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2019

MOTTO

"Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Dalam Ruang dan Waktu yang Sama"

Jangan mengatakan "Seharusnya Aku Kemarin "

Tapi katakan "Hari Ini Aku Harus "

Dan

Lakukan yang Terbaik untuk Besok, Lusa dan Selamanya

BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap

Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)

Disusun oleh

: Lucky Berliana Ovianti

NIM

: 145030201111062

Fakultas

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat

: Keuangan

Malang, 8 Juli 2019

Dosen Pembimbing

<u>Nila Firdausi Nuzula, Ph.D</u>

NIP. 19730530 200312 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari

: Selasa

Tanggal

: 16 Juli 2019

Jam

: 09.30

Skripsi atas nama

: Lucky Berliana Ovianti

Judul

: Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap

Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan BUMN yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)

dan dinyatakakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Nila Firdausi Nuzula, Ph.D NIP.19730530 200312 2 001

Anggota

Anggota

Muhammad Saifi, Dr., Drs. M.Si

NIP. 19570712 198503 1 001

Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP

BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 4 Juli 2019

Lucky Berliana Ovianti
145030201111062

BAFF708484031

RINGKASAN

Lucky Berliana Ovianti, 2019, Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016). Nila Firdausi Nuzula, Ph.D, 171 Hal + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan parsial *Good Corporate Governance* yang terdiri dari variabel independen Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manjerial dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap Manajemen Laba yang dihitung menggunakan *Discretionary Accruals*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dana analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program SPSS 24.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu sebelum adanya variabel kontrol dan sesudah adanya variabel kontrol. Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa Nilai *Adjusted R Square Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba adalah 64,8%, sedangkan 35,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesisis kedua adalah nilai F.sig α (0,000) < 0,05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. Hasil pengujian Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen *Good Corporate Govarnence* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba dengan nilai sig <0,05.

Hasil Pengujian ke empat diketahui bahwa Nilai *Adjusted R Square Good Corporate Governance* setelah adanya variabel kontrol terhadap Manajemen Laba adalah 65,8%, sedangkan 34,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesisis kelima adalah nilai F.sig α (0,000) < 0,05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba meskipun setelah ditambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan. Hasil pengujian Hipotesis keenam menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen *Good Corporate Govarnence* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba dengan nilai sig <0,05 setelah adanya variabel kontrol.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba.

SUMMARY

Lucky Berliana Ovianti, 2019, The Influence of Good Corporate Governance (GCG) on Earnings Management (Study on the Company's State-Owned Enterprises (BUMN) Listed in Indonesia Stock Exchange period 2012-2016) Nila Firdausi Nuzula, Ph.D, 171 Page + xvi

This research aims to analyse and explain the simultaneous and partial influence of Good Corporate Governance consisting of independent variables of the Independent Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Manjerial ownership and company size As a control variable against earnings management which is calculated using Discretionary Accruals.

The type of research used is explanatory research with a quantitative approach. The analysis of the data used in this study is a descriptive analysis of the fund of multiple linear regression analyses and processed using SPSS 24 programs.

The hypothesis testing on this study was done twice, namely before the presence of control variables and the after-control variables. The results of the first hypothesis test are known that the Adjusted value of R Square Good Corporate Governance for profit management is 64.8%, while 35.2% are influenced by other variables not addressed in this study. The result of the second hypothesized test is the value F. Sig α (0.000) < 0.05 indicates there is a significant simultaneous influence of the variables of the independent Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Managerial Ownership of Earnings Management. The third hypothesis test results show that each independent Good Corporate Govarnence variable has a significant effect on earnings management with a sig value of < 0.05.

The fourth Test result is known that the Adjusted value of R Square Good Corporate Governance after a control variable against profit management is 65.8%, while 34.2% is influenced by other variables not addressed in this study. The results of the fifth hypothesis test are the grades F. Sig α (0.000) < 0.05 indicating there is a significant simultaneous influence of the variables of the independent Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit committee and managerial ownership of the profit management despite After added variable size control company. The test results of the sixth hypothesis show that each of the Good Corporate Govarnence independent variables have significant effect on earnings management with a sig value of < 0.05 after the control variable.

Keywords: Good Corporate Governance, Independent Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Managerial Ownership, Company Size, Earnings Management.

KATA PENGANTAR

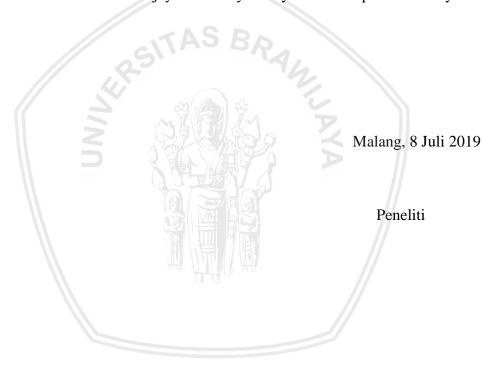
Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)" dengan baik. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

- 1. Alloh SWT yang telah meridhoi peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
- Ayah Imam Sayuti, Ibu Suliyah dan adik Wahyu Bagus Kurniawan dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan materi, motivasi, semangat, kasih sayang dan doa yang tak terhingga;
- Bapak Dr. Bambang Supriyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis;
- Ibu Nila Firdausi Nuzula, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi
 Bisnis dan selaku dosen pembimbing saya yang telah berkenan

- memberikan bimbingan terhadap penelitian skripsi ini dengan sabar dan memberikan motivasi serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
- 6. Bapak Ari Darmawan, Dr., S.AB., M.AB selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis;
- 7. Sahabat di UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya yang selalu memberikan doa dan dukungan;
- 8. Sahabat saya Siti Mudayanti, Qurrota A'yunina dan Nur Ana Lailil yang selalu memberikan motivasi, doa dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini;
- 9. Bapak Rukhani yang bersedia meminjamkan laptop demi kelancaran penelitian ini;
- 10. Terimakasih kepada Partner seperjuangan skripsi Andre Rhonaldo yang selalu memberikan bantuan dalam melengkapi data dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 11. Terimakasih kepada Teman-teman kos Fitri Umi Sholihah, Nur Inayah, Herlina Manurung, Kak Lala, Kak Farida dan Kak Rita yang selalu membantu dan memberikan hiburan saat lelah mengerjakan skripsi;
- 12. Ika Anisa, Puji handayani, Fadilla Eka, dan Dyah yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi;
- 13. Terimakasih kepada Tegar Eko Wahyu Nur Cipto Winoto yang tak hentihentinya membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pengerjaan sampai penyelesaian skripsi ini;

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

Penulis menyadari semaksimal mungkin apapun usaha yang telah dilakukan untuk menyusun penelitian skripsi ini, tetap ada kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi ke depannya yang lebih baik. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa, terutama Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya masyarakat luas pada umumnya.



DAFTAR ISI

	Halamar
MOTTO	j
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	v
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBARDAFTAR LAMPIRAN	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	<u>9</u>
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi dalam Penelitian Aspek Praktis	
1. Aspek Praktis	
2. Aspek Akademis	12
E. Sistematika Penulisan	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teoritis	23
1. Teori Keagenan (Agency Theory)	
2. Corporate Governance	24
3. Good Corporate Governance (GCG)	
a. Pengertian GCG	
b. Tujuan dan Manfaat GCG	
c. Prinsip-prinsip GCG	
d. Model GCG	
e. Pihak-pihak yang Terkait dalam GCG	
4. Mekanisme Penerapan GCG	
a. Dewan Komisaris Independen	
b. Dewan Direksi	
c. Komite Audit	
d. Kepemilikan Manajerial	
C. Pengaruh Antar Variabel	
1. Pengaruh antara Dewan Komisaris Independen, Dewan Direk	
Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Komite Audit	4(

2. Pegarun antara Dewan Komisaris Independen ternadap Mana	
3. Pengaruh Antara Dewan Direksi Dengan Manajemen Laba	41
4. Pengaruh Antara Komite Audit Dengan Manajemen Laba	
5. Pengaruh Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Manajeme	
6. Pengaruh Antara Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontr	
Manajemen Laba	
D. Model Konsep dan Model Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	
C. Variabel Penelitian	
1. Variabel Bebas	48
Variabel Bebas Variabel Kontrol	53
3 Variabel Terikat	53
D. Populasi dan Sampel	5 <i>6</i>
1. Populasi	56
2. Sampel	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data	
1. Analisis Deskriptif	
2. Analisis Statistik Inferensial	
a. Uji Asumsi Klasik	
1. Uji Normalitas	
2. Uji Multikolinieritas	
3. Uji Heteroskedastisitas	
4. Uji Autokorelasi	
b. Regresi Linier Berganda	62
c. Uji Hipotesis	63
1. Koefisien Determinasi	
2. Uji Statistik F	
3. Uji Statistik t	63
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan objek penelitian	
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia	
2. Visi dan misi Bursa Efek Indonesia	
B. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian	
1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
2. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	
3. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
4. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
5. Bank Mandiri (Persero) Tbk	

	6.	Jasa Marga 1bk	. 13
	7.	Kimia Farma (Persero) Tbk	. 74
	8.	Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	75
	9.		
	10.	. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	
		. Wijaya Karya (Persero) Tbk	
		. Waskita Karya (Persero) Tbk	
C.		nyajian Data	
	a.		
	b.	Dewan Direksi	
	c.	Komite Audit	
	d.	Kepemilikan Manajerial	
	e.		87
	f.	Discretionary Accruals	
D.		alisis Data	90
٠.	1.		91
	2.	Analisis Statistik Inferensial	94
		a. Uji Asumsi Klasik	95
		1. Uji Normalitas	95
		Uji Multikolinieritas	98
		Uji Heteroskedastisitas	99
		4. Uji Autokorelasi	
		b. Analisis Regresi Linier Berganda	
		Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1	
		Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2	
		c. Hasil Pengujian Hipotesis	
		Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 1	
		a) Koefisien Determinasi	
		b) Uji Statistik F Model Regresi 1	
		c) Uji Statistik t Model Regresi 1	
		Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 2	
		a) Koefisien Determinasi	
		b) Uji Statistik F Model Regresi 2	
		c) Uji Statistik t Model Regresi 2	
E	Dat	mbahasan Hasil Penelitian	
Ľ.	1.		
	1.	Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terha	
		Discretionary Accruals	-
	2	Pengaruh Secara Parsial Proporsi Dewan Komisaris Indepen	
	۷.	terhadap Discretionary Accruals	
	2	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Discretionary Accruals	
	3.	•	
	4. 5	Pengaruh Komite Audit Terhadap Discretionary Accruals	
	٥.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Discretic	onay 125
		ACCTUOIS	123

	6.	Pengaruh	Secara Sim	ultan	i Proporsi	Dewan	Komisar	is Inde	ependen,
		Dewan Da	ireksi, Komi	te A	udit, Kepe	emilikan	Manajeri	ial dan	Ukuran
		Perusahaa	n terhadap D	iscre	etionary Ā	cruals			126
	7.		Secara Par						
			Discretionary						
	8.		Dewan						
	9.	Pengaruh	Komite	•	Audit	Terh	adap	Discr	etionary
		Accruals							129
	10.	Pengaruh	Kepemilik	an	Manajeria	al T	erhadap	Discr	etionary
	11.	_	Ukuran Pe			_			
			ary Accruals						
F.	Ko	ntribusi Ac	lanya Ukurar	n Per	usahaan se	bagai va	riabel kor	ntrol	132
				- A					
BAB	V PI	ENUTUP							
A.	Kes	simpulan							
В.	Sar	an	<u></u>						136
	E 4 B	DIIGEAT	P ₹						120
DAF".	ľAK DIE	PUSTAK.	A	•••••			•••••		
LAM	PIK.	AN					•••••	•••••	143

DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
1.1 CG Watch Market Scores 2010-2016	4
2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	18
3.1 Indikator Variabel	
3.2 Kriteria Pemilihan Sampel	57
3.3 Sampel	58
4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel	
tahun 2012-2016	
4.2 Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016	83
4.3 Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016	85
4.4 Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016	86
4.5 Ukuran Perusahaan Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016	88
4.6 Discretionary Accruals Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016	89
4.7 Analisis Statistik Deskriptif	91
4.8 Hasil Ujui Kolmogrov-Smirnov	97
4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	98
4.10 Model Regresi	101
4.11 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1	102
4.12 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2	105
4.13 Koefisien Determinasi Model Regresi 1	109
4.14 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 1	110
4.15 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 1	112
4.16 Koefien Determinasi Regresi 2	114
4.17 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 2	115
4.18 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 2	117

DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
2.1 Model Konsep	43
2.3 Model Hipotesis	
4.1 Grafik Histogram	
4.2 Grafik Normal Probability Plot	
4.3 Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i>	



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
1. Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen	143
2. Hasil Perhitungan Dewan Direksi	145
3. Hasil Perhitungan Komite Audit	147
4. Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial	149
5. Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan	151
6. Hasil Perhitungan Discretionary Accruals	153
7 Hasil Analisis Data <i>Output</i> IBM SPSS 24	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang semakin luas berbanding lurus dengan kemajuan bisnis di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku bisnis yang ingin bersaing di pasar global. Persaingan tersebut mengharuskan para pelaku bisnis untuk menciptakan strategi yang tepat agar tidak mudah tergeser seiring dengan munculnya bisnis-bisnis baru yang lebih menarik. Kualitas strategi yang tinggi akan menghasilkan daya saing yang semakin tinggi pula, sehingga pasar global akan semakin kompleks. Sejalan dengan kompleksitas pasar global, maka muncul berbagai masalah. Salah satu masalah bisnis yang muncul akibat tuntutan daya saing dalam pasar global adalah teori agensi (agency theory).

Menurut Jensen dan Meckling (1976:308) teori agensi merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, sehingga harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Menurut Yushita (2010:53) pada kenyataannya manajemen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Menurut Nurwati dkk (2010) Perbedaan

informasi (asimetri informasi) ini membuka peluang manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Salah satu tindakan yang sering dilakukan manajemen adalah memanipulasi laporan keuangan. Ada beberapa cara yang untuk memanipulasi laporan keuangan, salah satunya dengan melakukan manajemen laba.

Menurut Setiawati dan Na'im (2000) Manajemen laba (earning management) adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Definisi manajemen laba secara umum adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Praktik manajemen laba ini sangat merugikan negara, baik dari segi ekonomi maupun etika bisnis. Pada umumnya manajemen laba ini dilakukan oleh negara-negara yang belum mempunyai sistem bisnis tertata, namun ternyata perusahaan-perusahaan di negara yang mempunyai sistem bisnis tertata pun juga melakukan praktik manajemen laba, contohnya adalah Amerika Serikat (Sulistyanto, 2008: 6).

Tidak semua manajemen laba mengarah pada aktivitas perusahaan yang bersifat negatif. Menurut Amat, Oriol, dan Gowthrope (2004) dalam Sulistiawan (2011:18) menyebutkan bahwa manajemen laba bisa disebut juga dengan *creative accounting*. *Creative accounting* adalah transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi, dan paraktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Menurut Rajput (2014) Potensi *creative*

accounting ditemukan dalam enam bidang utama, yaitu: fleksibiltas peraturan, kelangkaan peraturan, lingkup untuk *judgment* manajerial sehubungan asumsi tentang masa depan, waktu transaksi, penggunaan transaksi buatan dan reklasifikasi serta presentasi angka keuangan.

Kasus praktik manajemen laba sudah lama terjadi, bahkan terjadi pada negara maju. Beberapa contoh kasus besar di Amerika Serikat yang menjadi pusat perhatian dunia usaha di berbagai negara, yaitu skandal Enron Corporation, Green Tree Financial Corporation, Xerox dan Worldcom pada periode 2000-2001. Berbagai kasus manajemen laba yang terjadi di Amerika Serikat ini membuat kepercayaan terhadap profesi akuntansi memudar, karena Amerika Serikat merupakan kiblat standar akuntansi, standar profesi akuntansi, dan pasar modal di dunia (Sulistiawan, 2011). Beberapa kasus tentang praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia juga menjadi permasalahan yang serius dan perlu penanganan khusus (Sulistiawan dkk, 2011:54-58).

Menurut (Sasono, 2011) Praktik manajemen laba (earning management) yang tidak ditangani secara serius dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ini seharusnya dijaga agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya dengan menciptakan tata kelola perusahaan atau Corporate Governance. Effendi (2016:3) menyebutkan bahwa Corporate Governance (CG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

Menurut (Effendi, 2016:3) perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip CG dengan baik akan melahirkan sebuah konsep baru yang bernama *Good Corporate Governance* (GCG). GCG menjadi pilar penting dalam dunia bisnis karena menghubungkan kepercayaan investor dan perusahaan. GCG juga mendorong persaingan sehat dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga dapat mengarah pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan GCG juga akan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel (Komite Nasional Pemerintahan, 2006).

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik dalam Effendi (2016:23) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami keterlambatan dalam proses penerapan GCG dibandingkan dengan negara lain. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policies) baru mengeluarkan The Indonesian Code for Good Corporate Governance (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat di Indonesia. Komite Nasional Pemerintahan, menyebutkan bahwa kode ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi operasional perusahaan untuk memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1 Corporate Governance Watch Market Scores 2010-2016

Ranking	Negara	2010	2012	2014	2016
1	Singapore	67	69	64	67
2	Hong Kong	65	66	65	65
3	Japan	57	55	60	63
4	Taiwan	55	53	56	60
5	Thailand	55	58	58	58
6	Malaysia	52	55	58	56
7	India	49	51	54	55

Lanjutan Tabel 1.1

Ranking	Negara	2010	2012	2014	2016
8	Korea	45	49	49	52
9	China	49	45	45	43
10	Philippines	37	41	40	38
11	Indonesia	40	37	39	36

Sumber: Asian Corporate Governance Association (www.acga-asia.org), 2018

Tabel 1.1 menunjukkan skor penerapan GCG sebelas negara di Benua Asia. Menurut survei yang dilakukan oleh CLSA yang didukung oleh ACGA (Asian Corporate Governance Association) sebelas negara ini dipilih karena negara-negara tersebut menguasai pasar makro di Benua Asia baik dari segi peraturan keuangan, perusahaan yang go public, audit, investor, dan kelompok sosial masyarakat. Indonesia berada pada ranking terendah artinya penerpan GCG di Indonesia sangat lemah. Hal ini karena kurangnya kesadaran akan nilai dan praktek dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Organ utama dalam perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Organ utama dalam perusahaan yang dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi dan dewan komisaris. Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, terdapat organ lain yang berperan dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip dan GCG diterapkan dengan baik oleh direksi, yaitu komisaris independen. Mengingat beratnya tugas komisaris independen untuk mengawasi jalannya perusahaan, maka dibentuklah komitekomite. Berdasarkan pada Undang-undang No. 19 tahun 2003 Pasal 70 Salah satu komite harus dibentuk dalam BUMN adalah komite audit (Effendi, 2016:51).

Menurut Sutedi (2012:41) ada beberapa organ internal perusahaan yang dapat mendukung untuk mewujudkan GCG, salah satunya adalah pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh *National Association of Corporate directors* menyebutkan bahwa para *shareholder* yakin bahwa para manajer mengabaikan kepentingan mereka karena manajer tidak memiliki kepemilikan pada perusahaan sehingga tidak memikirkan hak *shareholder* (Wheelen, 2003:32). Menurut Jensen dan Meckling (1976) manajer yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan akan mengurangi *agency theory* dan dapat mendukung penerapan GCG.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) besar kecilnya ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan praktik manajemen laba. Besarnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, penjualan dan kapasitas pasar. Semakin besar aktiva dalam perusahaan, maka semakin besar pula modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka perusahaan tersebut akan semakin dikenal dan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Kondisi ini yang mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan yang sehat, karena para organ internal dalam perusahaan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh GCG terhadap praktik manajemen laba. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap manajemen laba, namun hasil yang diperoleh belum konsisten. Penelitian yang dilakukan Klien (2002) and Bedard *et al* (2004) dalam Nurwati *et al* (2010)

pembentukan dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi manajemen laba. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap menajemen laba.

Abbott et al (2004) and Bedard et al (2004) mengatakan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palestin (2006) yang menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Chen and Zhang (2012) mengatakan bahwa adanya dewan direksi dalam perusahaan mempunyai dampak positif untuk mengurangi praktik manajemen laba. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Menurut Rahmawati (2013) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ujhiyanto (2007) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Menurut Panggabean (2011), perusahaan dengan ukuran besar memiliki informasi yang lebih banyak, sehingga cenderung menjadi sorotan, pengamatan maupun bahan penelitian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat membantu mengontrol aktivitas perusahaan, khususnya pada praktik manajemen laba.

Hasil penelitian yang tidak konsisten, membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap praktik manajemen laba di Indonesia. Selain itu, beberapa peraturan di bidang keuangan masih banyak memberikan peluang untuk melakukan manajemen laba oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Pemilihan perusahaan BUMN sebagai objek penelitian dikarenakan BUMN merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. BUMN merupakan cerminan dari bisnis negara harus melakukan bisnis secara bersih dan baik, sehingga mampu menjadi panutan kemajuan bisnis di sektor lainnya. Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan adalah menerapkan *Corporate Governance* dalam perusahaan. *Corporate Governance* sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas BUMN dapat dijadikan sebagai tolok ukur penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut :

- 1. Apakah Good Corporate Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba ?
- 2. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba?
- 3. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Dewan Direksi dan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba?
- 4. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba?
- 5. Apakah Good Corporate Governance yang direpresentasikan oleh Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba?
- 6. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba ?
- 7. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba?

BRAWIJAY

- 8. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan Dewan Direksi setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba ?
- 9. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan Komite Audit, setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba ?
- 10. Apakah *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan Kepemilikan Manajerial setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba ?
- 11. Apakah Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan Good Corporate
 Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen,
 Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh
 secara simultan terhadap Manajemen Laba
- Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial Good Corporate
 Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

BRAWIJAY

- 3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate*Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Direksi terhadap Manajemen

 Laba
- 4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate*Governance yang direpresentasikan oleh Komite Audit terhadap Manajemen

 Laba
- Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial Good Corporate
 Governance yang direpresentasikan oleh Kepemilikan Manajerial terhadap
 Manajemen Laba
- 6. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen,

 Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial setelah

 ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
- 7. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate*Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Komisaris Independen setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
- 8. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate*Governance yang direpresentasikan oleh Dewan Direksi setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
- 9. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate*Governance yang direpresentasikan oleh Komite Audit setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

- 10. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan oleh Kepemilikan Manjerial setelah ditambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
- 11. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap Manajemen Laba

D. Kontribusi dalam Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku bisnis tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba, sehingga dapat membantu memberikan saran terhadap perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip dasar melakukan praktik bisnis agar tujuan perusahaan dapat lebih terarah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna informasi (pemegang saham, manajer, kreditur, karyawan dan *stakeholder*) untuk dapat lebih memahami penerapan *Good Corporate Governance* untuk mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan.

2. Aspek Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba perusahaan

BRAWIJAY

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Fakultas Ilmu Administrasi pada umumnya dan konsentrasi manajemen keuangan, terutama berkaitan dengan *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai konsep dan hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Manajemen Laba pada Perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis pengukuran data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan intepretasi hasil yang didasarkan pada analisis data. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi. Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Setiawan (2009)

Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini Adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, **Proporsi** Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earning Management (Manajemen Laba). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan. Selain itu dalam uji parsial komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

2. Hermanto (2011)

Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diproyeksikan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Sekretaris

Perusahaan. sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *earning* management (manajemen laba). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap *earning management*.

3. Sasono (2011)

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, Kualitas Auditor dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Hasil lainnya adalah variabel Keberadaan Komite dan Kepemilikian Institusional secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

4. Panggabean (2011)

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel kontrol dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit Independen, Kualitas Auditor Eksternal, dan Kosentrasi Kepemilikan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage* dan ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Hasil dari penelitian dengan pengujian regresi ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dalam komposisi dewan komisaris independen tidak

5. Rahadi (2014)

Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan transparansi komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh antara ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, dan transparansi komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Hasil lainnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, kualitas audit dan transparasi komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tabe	d 2.1 Mappin	Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahul	ıulu			
No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Setiawan (2009)	Variabel Independen : Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komisaris dan komisaris dan komisaris dan manajemen laba. manajemen laba.	Modified Jones Model	 Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba perusahaan. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris berpengaruh perpengaruh nanajemen laba. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 	Menggunakan Variabel independen komite audit, proporsi dewan komisaris independen. Menggunakan Variabel dependen manajemen laba.	Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur.

	- c		Ī			
No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Hermanto (2011)	Variabel independen: Good Corporate Governance (RUPS, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan). Variabel dependen: manajemen laba	Modified Jones Model	Good Corporate Governance mempunyai arah hubungan positif dengan earning management	 Menggunakan variabel independen dewan komisaris dan direksi. Menggunakan variabel dependen manajemen laba. 	 Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian manufaktur.

Lan	Lanjutan tabel 2.1					
No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>κ</i> .	Sasono (2011)	Variabel independen : dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, keberadaan komite dan kepemilikan institusional. Variabel dependen : manajemen laba	Modified Jones Model	1. Keberadaan komite dan kepemilikan institusional secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris auditor dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif.	Menggunakan Variabel independen dewan komisaris independen. Menggunakan variabel dependen manajemen laba.	Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN, sedangkan penelitian rerdahulu menggunakan penelitian menggunakan penelitian menggunakan penelitian manufaktur.

Lan	Lanjutan tabel 2.1					
No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Panggabean (2011)	Variabel independen : komposisi dewan komisaris, komite audit independen, kualitas auditor eksternal, konsentrasi kepemilikan. Variabel dependen : manajemen laba Variabel kontrol: leverage dan ukuran perusahaan.	Modified Jones Model	1. Penerapan tata kelola perusahaan dalam komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Tata kelola perusahaan dalam komposisi komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.	 Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Menggunakan variabel dependen manajemen laba. 	Variabel independen yang digunakan berbeda. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian terdahulu manufaktur

Lar	Lanjutan tabel 2.1					
No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Teknik Aanalisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
۶.	Rahadi (2014)	Variabel independen: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan transparansi komite audit. Variabel dependen: manajemen laba.	Modified Jones Model	 Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan kualitas audit, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Transparansi komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 	 Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan direksi dan komite audit. Variabel dependen adalah manajemen laba 	Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian terdahulu menggunakan penusahaan manufaktur

BRAWIJAY

B. Kajian Teoritis

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi merupakan dasar untuk memahami tata kelola perusahaan atau biasa disebut corporate governance yang berkaitan dengan principal dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976:308) teori agensi merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, sehingga harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Menurut Yushita (2010:53) pada kenyataannya agen atau manjemen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal atau shareholder. Asimetri informasi ini terjadi karena shareholder tidak bisa setiap hari memonitor untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan kontrak awal atau tidak.

Pemantauan yang kurang dari *shareholder* membuat manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai lingkungan kerja secara menyeluruh. Keadaan seperti ini yang sering memicu terjadinya konflik. Manajemen seringkali menyembunyikan beberapa informasi dari *shareholder*, terutama berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen dan laporan

keuangan. Manajemen dapat memanipulasi laba untuk menyesatkan para *shareholder* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Tindakan Intervensi dari manajemen dengan memanfaatkan asimetri informasi tersebut sering dikenal dengan manajemen laba (*earning management*).

2. Teori Corporate Governance

Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) dalam Effendi (2016:3), Corporate Governance (tata kelola perusahaan) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu Effendi (2016:3) menyebutkan bahwa Corporate Governance adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan peengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

Widiyatmaja (2010) dalam Sasono (2011:9) menyebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian penting dalam sistem *Corporate Governance*, yaitu :

- a) Pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu.
- b) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

3. Teori Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Effendi (2016:3) , berdasarkan pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Effendi (2016:7) terdapat 6 tujuan dalan penerapan GCG pada BUMN, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- 3) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan sekitar BUMN.
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional
- 6) Menyukseskan program privatisasi

Menurut Daniri (2005:18) terdapat beberapa manfaat penerapan *Good Corporate Governance*. Manfaat ini tentunya ditujukan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, namun bagi para *stakeholder*. Adapun manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Mengurangi agency cost

Apabila GCG diterapkan secara efektif dalam perusahaan, maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pendelegasian wewenang kepada manajemen dapat diperkecil.

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital)

Pengelolaan perusahaan yang baik akan mengurangi tingkat bunga atas sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pengurangan tingkat resiko yang harus dialami perusahaan.

- 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan serta meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 4. Meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder*.

Penerapan GCG yang efektif akan meningkatkan dukungan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap manajemen perusahaan. Hal ini karena *stakeholder* merasa mendapatkan keuntungan dan kesejahterahaan dari operasional perusahaan.

5. Peningkatan kepercayaan investor

Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG selalu berusaha untuk melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sehingga akan menarik investor

6. Peringkat kredit yang baik

Penerapan standar GCG yang kuat, maka perusahaan akan mendapatkan peringkat kredit yang baik

7. Mitigasi risiko perusahaan (pengurangan risiko)

Mitigasi risiko perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menetapkan proses bisnis dengan jelas yang disertai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas dari setiap unsur perusahaan guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang terbebas dari bias dan irasionalitas

8. Meningkatkan akses ke pasar modal

Perusahaan yang telah melaksanakan GCG lebih mudah melakukan peningkatan akses ke pasar modal sehingga apabila membutuhkan tambahan dana akan diperoleh dengan mudah.

c. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance mempunyai prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan tanpa melupakan kepentingan stakeholders. Terdapat lima prinsip dasar yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness. Menurut Daniri (2005:9) prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagi berikut:

1) Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2) Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

3) Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawabn perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk berkaitan dengan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

4) *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi merupakan hal penting dalm proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bias didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.

d. Model Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dibedakan menjadi beberapa model. Menurut Sutedi (2012:43) model *Good Corporate Governance* (GCG) dibagi menjadi 3, yaitu :

1) Principal Agent Model

Model ini menyebutkan bahwa perusahaan dikelola untuk memberikan *win-win solution*. *Win-win solution* ini diciptakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara *manager* dan pemegang saham.

2) The Myopic Market Model

Model ini lebih fokus pada kepentingan antara pemegang saham dengan *manager*. Hal ini terjadi karena sentimen pasar banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *Good Corporate Governance*. *The Myopic Market Model* ini juga memberikan saran kepada *principal* dan *agent* harus lebih berorientasi pada keuntungan-keuntungan jangka pendek.

3) Stakeholder Model

Model ini membuat fokus perhatian pada kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan secara luas. Hal ini berarti bahwa, *manager* harus memperhatikan batasan-batasan yang timbul

dimana perusahaan beroperasi untuk mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham. Adapun masalah yang biasa timbul meliputi etika dan moral, kebijakan hukum, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup dan ekonomi.

e. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Good Corporate Govarnance

Menurut Hamdani (2016:79) organ atau pihak-pihak yang terkait dalam penerapan *Good Corporate Governance* minimal harus memiliki tiga unsur yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diwajibkan membentuk minimal 3 (tiga) komite pembantu yaitu: Komite Audit, Komite Kibijakan Resiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berperan sebagai organ perusahaan yang merupakan media para pemegang saham untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip *good corporate governance* secara terbuka (*transparancy*) dan wajar (*fairness*) dan tidak mengesampingkan kepentingan perusahaan (Hamdani, 2016:80). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawabatas persiapan dan penyelenggraan RUPS dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pengambilan keputusan.

BRAWIJAY/

2) Dewan Direksi

Dewan direksi jika dilihat dari struktur perusahaan membawahi para manajer-manajer pada suatu perusahaan. Dewan Direksi juga bertugas dan bertanggung jawab layaknya para manajer secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dewan Direksi melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab dalam pengololaan perusahaan agar menghasilkan keuntungan usah

3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara kolektif bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjamin bahwa pihak Direksi dan jajaran manager beserta para staf perusahaan menerapkan GCG. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang; Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

4) Komite Audit

Komite Audit memiliki struktur anggota diketuai oleh Komisaris Independen dan anggota yang terdiri dari beberapa Komisaris dan Pelaku Profesi dari luar perusahaan. Komite Audit terbagi menjadi auditor internal dan auditor eksternal. Tugas pokok Komite Audit adalah mengkoreksi dan memeriksa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip

BRAWIJAY

5) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi beranggotakan diketuai oleh Komisaris Independen sedangkan anggotanya terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Tugas Komite Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Calon Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang terpilih beserta remunerasinya diajukan dengan tujuan untuk memperoleh keputusan RUPS.

6) Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan jika perlu dapat menggunakan pelaku profesi dari luar perusahaan. Tugas utama. Komite Kebijakan Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang telah disusun oleh Dewan Direksi dan menganalisis seberapa besar resiko yang akan diambil oleh perusahaan.

4. Mekanisme Penerapan Organ Corporate Governance

Menurut Sutedi (2012:41) *Corporate Governance* mempunyai unsurunsur yang berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal) yang bisa menjamin fungsinya *Good Corporate Governance*. Adapun unsur *Corporate Governance* internal perusahaan adalah Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem remunerasi berdasarkan kinerja dan Komite audit. Sedangkan *Corporate Governance* eksternal perusahaan meliputi kecukupan undang-undang dan

BRAWIJAY

perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Menurut Effendi (2016:9) perusahaan mempunyai organ utama, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, terdapat organ lain yang berperan dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh direksi, yaitu Komisaris Independen. Mengingat beratnya tugas komisaris independen, maka dibentuklah komite-komite, salah satu komite yang harus dibentuk BUMN sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 70 yaitu Komite Audit. Di dalam penelitian ini lebih menganalisa makanisme internal yang terdiri dari dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan manajerial

a) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen biasa dikenal sebagai direksi independen. Menurut Effendi (2016:42) dewan komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor. Mengingat pentingnya peran dewan komisaris independen, banyak perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memiliki direktur independen dan komisaris independen dalam struktur organisasinya. Dewan komisaris independen mempunyai peran penting dalam membantu implementasi *Good Corporate*

Governance (GCG) dalam perusahaan. Dewan komisaris independen diharapkan dapat melakukan deteksi dini (early warning) apabila terdapat penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan di perusahaan publik, karena biasanya komisaris independen berperan sebagai ketua komite audit

b) Dewan Direksi

Dewan direksi sangat erat kaitannya dengan komisaris. Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan. Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun pedoman perusahaan (Effendi,2016:26). Hal ini berati Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi (KNKG, 2006:17). Dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan.

c) Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau

dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Puradiredja, 2006:4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal, yaitu :

- 1) Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan satuan pengawas internal maupun auditor eksternal;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN;
- 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawas lainnya.

d) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi komisaris maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan (Gideon dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, maka manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk

kontribusi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi akan mampu menurunkan biaya keagenan. Pernyataan ini sesuai dengan teori yang disebutkan Jensen dan Meckling (1976) bahwa untuk meminimalkan konflik kegenan adalah dengan memperbesar kepemilikan manajerial dalam perusahaan.

5. Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008:313) Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Mallaret (2008:233) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai perangkat kebijaksanaan yang ditetapkan dengan baik dan harus dilaksanakaan oleh sebuah perusahaan yang bersaing secara global. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat menentukan besar kecilnya perusahaan melalui :

- a) Nilai *Equity*, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu.
- b) Nilai Penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada periode tertentu.
- c) Jumlah Karyawan, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
- d) Nilai Total Aktiva, merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang

dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar cenderung memiliki stabilitas yang baik. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang investor. Para investor akan tertarik untuk memiliki saham di perusahaan tersebut. Menurut Fahmi (2011:2) semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan, maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini membuat pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas.

6. Manajemen Laba

Menurut Yushita (2010:55) manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat menggangu bahkan membahayakan perusahaan. Definisi *earnings management* menjadi dua, yaitu:

- 1. Definisi sempit *earnings management*. Dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi, yaitu perilaku manajemen untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* (manipulasi pendapatan akrual) dalam menentukan besarnya *earnings*.
- 2. Definisi luas *earnings management* adalah tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit

BRAWIJAYA

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Sugiri (2005) memandang bahwa salah satu motivasi manajemen laba adalah mengelabuhi kinerja ekonomi yang sebenarnya. Hal itu dapat terjadi karena terdapat ketidaksimetrian informasi antara manajemen dan pemegang saham perusahaan. Motivasi manajemen laba lainnya adalah mempengaruhi penghasilan yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan dengan asumsi bahwa manajemen memiliki kepentingan pribadi (self-interest) dan kompensasinya didasarkan pada laba akuntansi. Adanya hubungan antara manajemen dengan pemilihan metode akuntansi menyebabkan manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen akrual diskresioner dalam menentukan besarnya laba laporan (earnings).

Para akuntan perlu memahami fenomena manajemen laba agar dapat lebih memahami kemanfaatan laba bersih, baik untuk penyampaian informasi kepada investor maupun untuk keperluan pengontrakan (contracting). Manajemen laba dapat mempengaruhi kredibilitas dan reliabilitas laporan keuangan dan dapat menyebabkan biasnya keputusan investasi yang diambil oleh para investor dan kreditor. Menurut Sulistiawan (2011:40) terdapat beberapa pola manajemen laba (Scott, 1997), yaitu sebagai berikut:

1. Kepalang basah (taking a bath)

Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai dalam perusahaan yang sedang mengalami masalah, atau pada perusahaan yang sedang mengalami pergantian kepemimpinan.

2. Metode menurunkan pendapatan (income decreasing method)

Pola ini dilakukan dengan cara menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari pada laba sebenarnya. Biasanya cara ini dilakukan pada kondisi laba perusahaan yang tinggi agar pembayaran pajak tidak terlalu besar.

3. Metode menaikkan pendapatan (income increasing method)

Pola ini dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Cara ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapatkan kepercayaan dari kreditor.

4. Perataan laba (income smoothing)

Perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten dari periode ke periode.

7. Pengukuran manajemen laba

Menurut Sulistiawan (2016:66) manajemen laba dapat diidentifikasi dan diukur melalui dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif, pengukuran dilakukan dengan analisis akuntansi sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator manajemen laba yang didapat dari riset secara empiris.

Menurut Mohanram (2003) dalam Setiawan (2016:67) terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam pengukuran manajemen laba menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu :

- a. Mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan;
- Menilai seberapa fleksibel perusahaan menerapkan kebijakan akuntansinya;
- c. Menilai strategi yang digunakan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perbedaan kebijakan akuntansi perusahaan yang sedang dijalankan dengan kebijakan perusahaan lain;
- d. Menilai kualitas informasi yang disampaikan;
- e. Mengidentifikasi adanya potensi permasalahan akuntansi dalam perusahaan.

Menurut Setiawan (2011:70) terdapat dua cara untuk mengukur manajemen laba dengan metode kuantitatif, yaitu manajemen laba melalui

kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah pada manipulasi angka laba yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Manajemen laba melalui aktivitas riil adalah bermain angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan operasional perusahaan.

Pengukuran manajemen laba melalui kebijakan akuntansi fokus pada model dalam riset empiris, yaitu: Jones Model (1991), Modified Jones Model (1995), Kaznik Model (1999) dan Performance-Matched Discretionary Accruals Model (2005). Penelitian ini menggunakan discretionary accruals (manajemen laba melalui aktivitas riil) sebagai proyeksi manajemen laba dan dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (1995). Model ini dianggap mempunyai kemampuan yang baik untuk mendeteksi manajemen laba dibandingankan dengan pendekatan lain karena model ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan Jones model yang berasumsi bahwa pendapatan tidak sepenuhnya terlepas dari usaha manipulasi. Padahal, jika pengelola perusahaan ternyata melakukan manipulasi melalui pendapatan, maka Jones Model akan menjadi bias. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Dechow et al (1995) terhadap lima model pendeteksi manajemen laba, Modified Jones Model memiliki tingkat akurasi yang paling baik dibanding model yang lain.

BRAWIJAYA

 Pengaruh antara dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) menyebutkan bahwa variabel good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini berarti Good Corporate Governance berpengaruh terhadap praktik manajemen laba secara bersama-sama. Penelitian yang dilakukan Hermanto (2011) juga menyebutkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan dan RUPS berpengaruh simultan terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap manajemen laba

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) Variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berati bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen tidak menjamin keefektifan pengelolaan *Good Corporate Governance*, sehingga tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan.

3. Pengaruh antara dewan direksi dengan manajemen laba

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahardi (2104) dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berati bahwa semakin besar dewan direksi maka praktik manajemen laba dalam perusahaan akan semakin meningkat, karena para direksi sibuk untuk mengatur koordinasi.

4. Pengaruh antara komite audit dengan manajemen laba

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan (2009) komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa, komite audit mampu mengurangi konflik kepentingan yang mendorong timbulnya manajemen laba dan dapat menghambat praktek manajemen laba.

5. Pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajer. Manajer yang mempunyai kepemilikan pada perusahaan akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) menyatakan adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba dalam perusahaan.

BRAWIJAY

6. Pengaruh antara ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dengan manajemen laba

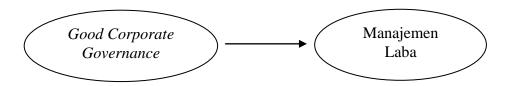
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ujhiyanto (2007), Perusahaan dengan ukuran besar memiliki informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung lebih diamati, baik oleh media masa maupun analisis. Keadaan seperti ini diharapkan dapat mengurangi praktik *earning management*.

D. Model Konsep dan Model Hipotesis

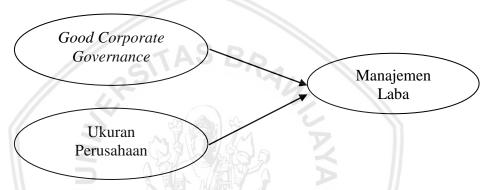
1. Model Konsep

Model konsep dalam penelitian berfungsi untuk menggambarkan fenomena dengan jelas agar mudah dipahami mengenai sesuatu yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara good corporate governance terhadap manajemen laba. Dimana good corporate governance diproksikan oleh dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel manajemen laba diproksikan dengan Discretionary Accruals. Penelitian ini menggunakan dua model konsep. Model konsep pertama menggambarkan pengaruh antara variabel independen terhadap dependen sebelum adanya variabel kontrol. Model konsep kedua menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan adanya variabel kontrol. Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai good corporate governance serta manajemen laba perusahaan, maka diperoleh gambaran dalam kerangka sebagai berikut:

a. Model Konsep 1



b. Model Konsep II

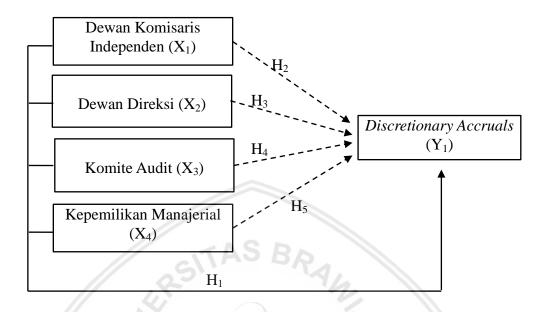


Gambar 2.1 Model Konsep Sumber: Data diolah, 2018

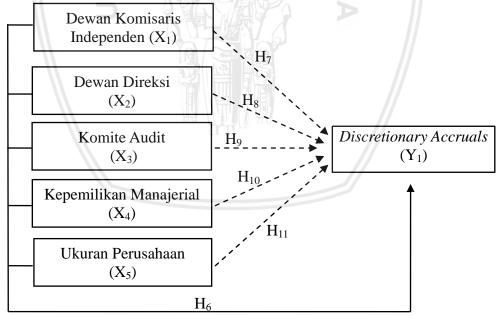
2. Model Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, disebut jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum mengacu berdasarkan fakta – fakta empiris yang dikumpulkan dan diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono, 2011:64). Penelitian ini menggunakan model hipotesis sebagai berikut. Hipotesis penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini digambarkan melalui kerangka model hipotesis sebagai berikut:

$a. \quad H_{1,}\,H_{2,}\,H_{3,}\,H_{4,}\,H_{5}$



b. H_{6} , H_{7} , H_{8} , H_{9} , H_{10} , H_{11}



Gambar 2.2 Hipotesis

Sumber: Data diolah, 2018

Keterangan:

= Pengaruh secara simultan

----- = Pengaruh secara parsial

Rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

- H_1 = Dewan Komisaris Independen (X_1), Dewan Direksi (X_2), Komite Audit (X_3), Kepemilikan Manajerial (X_4) berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_2 = Dewan Komisaris Independen (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_3 = Dewan Direksi (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_4 = Komite Audit (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_5 = Kepemilikan Manajerial (X_4) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_6 = Dewan Komisaris Independen (X_1), Dewan Direksi (X_2), Komite Audit (X_3), Kepemilikan Manajerial (X_4) dan Ukuran Perusahaan (X_5) sebagai variabel kontrol berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba (Y_1)
- H_7 = Dewan Komisaris Independen (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1) setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan (X_5) sebagai variabel kontrol
- H_8 = Dewan Direksi (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1) setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan (X_5) sebagai variabel kontrol
- H_9 = Komite Audit (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1) setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan (X_5) sebagai variabel kontrol

- $H_{10}=$ Kepemilikan Manajerial (X_4) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1) setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan (X_5) sebagai variabel kontrol
- H_{11} = Ukuran Perusahaan (X_5) berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba (Y_1)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimasukkan sebagai penelitian penjelasan (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Zulgenaf (2008:11) explanatory research merupakan jenis peneliitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:7), pendekatan kuantitatif merupakan metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu: empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data dalam penelitian ini berupa angkangka dan analisis menggunakan statistik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bursa Efek Indonesia yang bisa diakses langsung melalui *website* resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu <u>www.idx.co.id</u>. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga resmi yang menyediakan datadata perusahaan yang terdaftar di lembaganya secara lengkap dan akurat. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2012-2016. Alasan peneliti memilih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sampel penelitian karena BUMN merupakan perusahaan yang didirikan

dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasionaldi sektor industri dan bisnis strategis agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun perusahaan yang ada di BUMN ikut melakukan praktik manajemen laba di Indonesia, sehingga kredibilitas BUMN diragukan dan dianggap kurang maksimal.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:38). Penelitian ini menggunakan tiga macam variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas), variabel kontrol, dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) (X)

Variabel Bebas (*Independent Variabel*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, atau dapat dikatakan sebagai variabel yang menjadi penyebab timbulnya perubahan (Sugiyono, 2014:39). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG), dan indikator pengukurnya adalah sebagai berikut:

a) Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen hendaknya dapat berperan efektif untuk membantu melakukan deteksi dini (early warning) jika terdapat potensi penyimpangan ataupun kecurangan di perusahaan publik. Hal ini dapat dilakukan karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan

komite audit yang dipimpinnya merupakan kunci sukses yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut pedoman umum GCG di Indonesia jumlah komisaris independen dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yang terpenting adalah dapat mengontrol mekanisme berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat utama Komisaris Independen adalah memiliki kemampuan akuntansi atau memiliki latar belakang keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen pada perusahaan perbankan menyatakan setiap perusahaan perbankan wajib memiliki lebih dari 2 (dua) anggota dewan komisaris, dan wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewan Komisaris Independen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

Sumber: Ujiyantho dan Pramuka, 2007

Keterangan:

DKI = Dewan Komisaris Independen

b) Dewan Direksi

Dewan direksi (*board of director*) berfungsi untuk mengurus perusahaan. Dewan direksi ini dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan

implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan. Menurut

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Keberadaan dewan direksi tersebut bertugas sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan, maka ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan. Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perusahaan, pengelolaan kinerja, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar perusahaan. Perusahaan terbuka diwajibkan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih.

c) Komite Audit

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian *intern*. Komite audit membantu mewujudkan pengawasan yang efektif dari komisaris dan

BRAWIJAYA

dewan pengawas. Komite audit bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal. Komite audit juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap semua informasi yang dikeluarkan oleh BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan dewan pengawas, serta tugas-tugas komisaris dan dewan pengawas yang lain (Setiawan, 2009).

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, di mana setidaknya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Menurut Klein (2006) perhitungan komite audit independen yaitu dengan menggunakan rasio komisaris independen dalam komite dengan total anggota komite audit.

Komite Audit = $\frac{\text{Komisaris independen dalam komite audit}}{\text{Total komite audit}}$

Sumber: Klein, 2006

d) Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagaian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham diperusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini

dipresentasikan besarnya presentase kepemilikan oleh manajer. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976: 339). Dengan demikian, manajer akan bertindak secara hatihati dalam mengambil keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil keputusan yang diambil.

Berdasarkan sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung kepemilikan manajerial:

	Jumlah kepemilikan manajer	
Kepemilikan Manajerial (%) =		x 100
	Jumlah seluruh saham	

Sumber: Sugiarto, 2009

2. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen tidak terganggu oleh faktor luar yang tidak diteliti. (Sugiyono, 2014:39). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba, yaitu ukuran perusahaan.

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan hasil logaritma dari total aset. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar. Parameter lain yang dapat menunjukkan ukuran perusahaan menurut Hartono (2014:647) adalah nilai total aktiva, penjualan bersih atau nilai ekuitas. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan nilai logaritma dari total asset.

Ukuran Perusahaan = LN (Total asset)

Sumber: Raithaha dan Komera (2016)

Keterangan:

LN = Logaritma natural

Total Asset = Total Asset perusahaan

3. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y)

Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2014:39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba diukur dengan

BRAWIJAYA

menggunakan proksi *Discretionary Accrual* (DA) yang diukur dengan menggunakan *Modified Jones Model* (MJM). Menurut Sulistiawan dkk (2011:72) *Modified Jones Model* (MJM) dikembangkan oleh Dechow dan kawan-kawan. *Discretionary Accruals* mempunyai beberapa nilai, yaitu nilai positif, negatif dan nol. Nilai positif berarti perusahaan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba perusahaan, nilai negatif berarti perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba, sedangkan nilai 0 (nol), berarti perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Menurut Sulistiawan dkk (2011:73) langkah untuk menentukan *discretionary accruals* sebagai indikator manajemen laba, yaitu:

1. Menentukan nilai total akrual

Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Nilai total akrual dapat ditentukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Menentukan nilai total accrual diestimasi dengan persamaan regresi
 OLS:

$$TA_{it}/A_{it\text{-}1} = \alpha 1 (1/A_{it\text{-}1}) + \alpha 2 (\Delta R_{evit}/A_{it\text{-}1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it\text{-}1}) + e$$

 Menghitung nilai NDA (non discretionary accruals) dengan menggunakan koefisien regresi.

NDA (Nondiskresional Akrual) adalah komponen akrual yang terjadi seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan, misalnya aset dan jumlah pegawai. Cara menghitung NDA adalah sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha 1 (1/A_{it\text{-}1}) \, + \, \alpha 2 \, \left(\Delta R_{evit} / A_{it\text{-}1} \, - \, \Delta R_{ecit} / A_{it\text{-}1} \, \right) \, + \, \alpha_3 \left(PPE_{it} / A_{it\text{-}1} \right)$$

4. Menentukan nilai discretionary accruals

DA (Diskresi Akrual adalah) akrual yang nilainya ditentukan oleh kebijakan atau diskresi manajemen.

Nilai discretionary accruals dapat dihitung sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{its}$$

Keterangan:

= Total akrual perusahaan i dalam periode t TA_{it} NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t NDA_{it} = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t = Akrual diskrisioner perusahaan i pada periode t DA_{it} = Total asset total perusahaan i pada periode t A_{it-1} $\Delta R_{\rm evit}$ = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t = Perubahan piutang penjualan perusahaan i pada periode t ΔR_{ecit} = Aktiva tetap perusahaan perusahaan i pada periode t PPE_{it} $\alpha 1, \alpha 2, \alpha_3$ = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi = eror

Tabel 3.1 Indikator Variabel

Konsep	Variabel				
	1. Dewan Komisaris Independen (x ₁)				
aaa	2. Dewan Direksi (x ₂)				
GCG	3. Komite Audit (x ₃)				
	4. Kepemilikan Manajerial (x ₄)				
Ukuran Perusahaan	Total Asset				
Manajemen Laba	Discretionary Accruals (y ₁)				

Sumber: data sekunder diolah, 2018

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel memerlukan ketelitian tersendiri, karena suatu sampel yang baik adalah sampel yang benar-benar mewakili seluruh karakteristik yang ada pada populasi (representative). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun Pertimbangan atau kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Indikator Sampel

- a. Perusahaan BUMN terdaftar di BEI Periode 2012-2016
- Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (annual report) selama tahun 2012-2016
- c. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah

d. Perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan

Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Kode					Terpilih/tidak terpilih
110.	Koue	1	2	3	4	_
1	ADHI	✓	√	✓	✓	Dipilih
2	ANTM	✓	✓	√	✓	Dipilih
3	BBNI	✓	✓	✓	✓	Dipilih
4	BBRI	✓	✓	√	✓	Dipilih
5	BBTN	1	-	✓	V	Tidak Dipilih
6	BMRI	✓	1	4	✓	Dipilih
7	GIAA	1	V	-	1	Tidak Dipilih
8	INAF	V	√	✓	-	Tidak Dipilih
9	JSMR	✓	4	~	√ 1	Dipilih
10	KAEF	✓	1	√	Y	Dipilih
11	KRAS	1	1		1	Tidak Dipilih
12	PGAS	✓	1		· /	Tidak Dipilih
13	PTPP	✓	✓	✓	✓	Dipilih
14	SMBR	✓	i i	✓	EL-	Tidak Dipilih
15	SMGR	✓	V	1	₩ 🗸	Dipilih
16	PTBA	✓	-	✓	✓	Tidak Dipilih
17	TINS	✓	√	√	-	Tidak Dipilih
18	TLKM	✓	√	✓	✓	Dipilih
19	WIKA	✓	✓	✓	✓	Dipilih
20	WSKT	✓	✓	✓	✓	Dipilih

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, terdapat 12 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Nama perusahaan yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
3	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
6	JSMR	Jasa Marga Tbk
7	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk
8	PTPP	PP (Persero) Tbk
9	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
10	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
11	WIKA	Wijaya Karya Tbk
12	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk

Sumber: data sekunder diolah, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi karena data yang digunakan merupakan data sekunder. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 untuk membantu menjawab rumusan masalah.

BRAWIJAY/

1) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul, tanpa membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Uji statistik dalam analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis (pernyataan sementara) dari sebuah penelitian yang bersifat deskriptif (Siregar, 2017:126).

2) Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial atau sering disebut statistik induktif digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2016:148). Statistik inferensial berhubungan dengan penguraian hipotesis suatu data keadaan atau fenomena.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya bias mengingat tidak semua data dapat diterapkan pada regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi terdistribisi secara normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:160). Model regresi yang baik adalah yang memiliki ditribusi data normal atau mendekati normal. Dapat dikatakan terdistribusi normal jika angka probabilitas lebih dari 0,05. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *statistic Kolmogorov*

BRAWIJAY

Smirnov. Test dengan taraf signifikan < 5%, maka dinyatakan terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2005:105). Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi salah satunya adalah dengan menggunakan nilai *tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai TOL lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Sedangkan jika nilai TOL mendekati angka 1 dan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas kurang dari 10 maka model regresi menunjukkan bebas dari multikolinieritas. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2 x t)}$$
 atau $VIF = \frac{1}{Tolerance}$

Sumber: Ghozali, 2005:106

Keterangan:

VIF = Variance Inflation Factor

 R^2 x t = nilai R^2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel independen

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi varian yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu (residual). Model regresi yang baik adalah homoskesdastisitas.

Homoskesdastisitas adalah varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap Akibat adanya heterokedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005:139):

- a. Penaksir (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan variansnya sudah tidak minim lagi (tidak efisien) baik dalam sampel kecil maupun sampel besar
- b. Kesalahan indikasi dan koefisien determinasi memperlihatkan daya penjelasan terlalu besar

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Model regreasi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji autokorelasi antara lain dapat dilakukan dengan Uji *Durbin Watson*, Uji *Langrange Multiplier*, Uji *Statistics Q: Box Pierce* dan *Ljung Box*, dan *Run Test* (Ghozali, 2006: 110). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Durbin Watson*.

Penelitian ini menggunakan pengujian Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas atas (du) dan nilai batas bawah (dl) dari tabel pada jumlah observasi n, jumlah variabel bebas k, dan tingkat signifikan α. Dasar pengambilan keputusan autokorelasi menurut Ghozali (2005:111):

Tabel 3.4 Dasar	Pengambilan	Keputusan	Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d <dl< td=""></dl<>
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada Keputusan	$dl \le d \le du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	4 - dl < d < 4
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada Keputusan	$\begin{array}{c c} 4-du \leq d \leq 4-\\ dl \end{array}$
Tidak ada autokorelasi, positif maupun negatif	Tidak ditolak	du < d < 4 - du

Sumber: Ghozali, 2005:112

b. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana. Dua metode ini sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data yang didapatkan di masa lalu. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variable bebas (independen) terhadap satu variable terikat (dependen) (Siregar, 2017:301).

Rumus;

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_n x_n$$

Keterangan:

Y = variable terikat

a dan b_1 serta b_2 = konstanta

 $egin{array}{lll} x_1 &= \mbox{variable bebas pertama} \\ x_2 &= \mbox{variable bebas kedua} \\ x_n &= \mbox{variable bebas ke-n} \\ \end{array}$

BRAWIJAY

c. Uji Hipotesis

1. Koefisisen Determinasi (R²)

Uji Koefisisen Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisisen determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisisen determinasi yang kecil berati bahwa kemampuan variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:97).

2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Cara menguji hipotesis menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Bila nilai F lebih besar dari 4, maka Ho dapat ditolak pada taraf kepercayaan 5%.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel (Ghozali, 2005: 98)

3. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

BRAWIJAYA

- a. Bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut)
- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel (Ghozali, 2005:99).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai "Kegiatan yang bersangkutan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan Efek". Instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar modal merupakan jenis instrumen jangka panjang yang masa berlakunya lebih dari satu tahun. Keberadaan pasar modal memliki dua fungsi khususnya bagi para investor. Fungsi pertama adalah pasar modal digunakan sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal atau dana dari para atau pemodal investor di perusahaan lain. Fungsi kedua adalah pasar modal berguna sebagai sarana masyarakat umum yang ingin berpartisipasi menanamkan modalnya dengan cara investasi pada suatu perusahaan dalam bentuk instrumen keuangan berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta yang diwaktu itu masih disebut (Batavia) pada tahun 1912 untuk kepentingan pemerintah kolonial pada saat itu. Terjadinya perang dunia I membuat Bursa Efek di Batavia ini sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1925 di beberapa daerah tepatnya di

Bursa Efek Jakarta, Semarang dan Surabaya. Kondisi pertumbuhan pasar modal yang tidak berjalan dengan baik, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, dan pengaruh isu politik serta dampak dari sisa perang dunia I dan II membuat Bursa Efek kembali ditutup. Penutupan Bursa Efek pertama diawali Bursa Efek Semarang dan Surabaya pada tahun 1939, dan kemudian disusul penutupan Bursa Efek Jakarta pada tahun 1942. Setelah sempat ditutup dan vakum, bursa efek dibuka dan diaktifkan kembali kegiatannya pada tanggal 10 Agustus 1977. Bursa efek yang diaktifkan pada saat itu adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang secara resmi dibuka dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), yang merupakan lembaga berwenang baru di bawah Departemen Keuangan. Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar modal mengalami peningkatan seiring dengan berbagai insentif dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta membuat berkembanganya pasar keuangan dan sektor swasta dengan puncak pertumbuhan pada tahun 1990. Perbaikan dan pertumbuhan kemajuan pasar modal berdampak hingga adanya penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai sekarang (www.idx.co.id).

2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berikut visi dan misi dibentuknya Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:

a. Visi: menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

BRAWIJAY

b. Misi : menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance.

Visi dan misi BEI dikembangkan untuk menentukan nilai dasar (core values) dan kompetensi dasar (core competencies). Core values yang diterapkan oleh BEI adalah teamwork, integrity, profesionalism, dan service excellence. Core competencies yang dimiliki oleh BEI meliputi building trust, integrity, strive for excellence, dan customer focus (www.idx.co.id).

B. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengambilan periode selama lima tahun yaitu 2012-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil dari teknik pengambilan sampel diperoleh 21 perusahaan sektor perbankan yang digunakan sebagai objek penelitian. Berikut gambaran umum 21 perusahaan sektor perbankan yang menjadi sampel penelitian.

1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1960 di Jakarta, Indonesia. Pada awalnya perusahaan ini adalah

milik Belanda, namun sejak tanggal 11 Maret 1960, perusahaan ini dinasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terdapat beberapa bisnis pada ADHI, yaitu layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti dan *real estate*.

Sejak tanggal 1 Juni 1974, ADHI menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 2004, ADHI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 441.320.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran Rp150,- per saham. Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atau sebanyak 44.132.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan secara khusus kepada manajemen (Employee Management Buy Out / EMBO) dan karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (Employee Stock Allocation/ESA). Kemudian pada tanggal 18 Maret 2004 seluruh saham ADHI telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia).

2. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara melalui *merger* dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang

Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek Bapetamb. Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perusahaan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan) dan sejak itu dikenal sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang.

ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. ANTAM memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang bagus. Pada tahun 1997 ANTAM menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, ANTAM mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat (www.antam.com)

3. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan

Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero).

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI melakukan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010 untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya dalam industri perbankan nasional. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. (www.bni.co.id)

4. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi

Purwokerto" pada tanggal 16 Desember 1895. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. (www.bri.co.id)

5. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) (BMRI) didirikan 02 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Saat ini, Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 83 kantor area, dan 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor mandiri mitra usaha, 178 kantor kas dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza dan Shanghai (Republik Rakyat Cina). Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo"). Pemegang saham pengendali Bank Mandiri adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60%.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Pada tanggal 23 Juni 2003, BMRI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BMRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.000.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp675,- per saham. Sahamsaham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juli 2003. Pada Bank Mandiri terdapat 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna

yang dipegang Pemerintah Negara Republik Indonesia. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui penembahan modal, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, likuidasi dan pembubaran.

6. Jasa Marga Tbk

Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Pada tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga. Pada akhir tahun 80-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme *Build*, *Operate and Transfer* (BOT). Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan mengatur lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol, diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol

(BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. (www.jasamarga.com)

7. Kimia Farma (Persero) Tbk

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. (www.bumn.go.id)

BRAWIJAYA

8. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama PP (Persero) Tbk (PTPP) didirikan 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia, dan selanjutnya dilebur ke dalam P.N. Pembangunan Perumahan, yang didirikan tanggal 29 Maret 1961. Pemegang saham pengendali PP (Persero) Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 51,00% di saham Seri B. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan PTPP adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, Engineering Procurement dan Construction (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realti (Pengembang), Properti dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi. PTPP memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PP Properti Tbk . Pada tanggal 29 Januari 2010, PTPP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PTPP (IPO) seri B kepada masyarakat sebanyak

BRAWIJAYA

1.038.976.500 dengan nilai nominal Rp100,- per saham saham dengan harga penawaran Rp560,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Februari 2010.

9. Semen Indonesia (Persero) Tbk

Semen Indonesia (Persero) Tbk dahulu bernama Semen Gresik (Persero) atau SMGR Tbk. Didirikan 25 Maret 1953 dengan nama "NV Pabrik Semen Gresik" dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 07 Agustus 1957. Pabrik Semen Gresik dan anak usaha berada di Jawa Timur (Gresik dan Tuban), Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan an Quang Ninh di Vietnam. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMGR meliputi berbagai kegiatan industri. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak di industri semen. Hasil produksi Perusahaan dan anak usaha dipasarkan didalam dan diluar negeri. Pada tanggal 04 Juli 1991, SMGR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SMGR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 40.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Juli 1991.

10. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan *Post Telegraaf Telefoon* (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian

layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham *PT Indonesian Satellite Corporation Tbk*. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham. Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan

penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan "New Telkom" ("Telkom baru") yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan.

11. Wijaya Karya (Persero) Tbk

Wijaya Karya (Persero) Tbk didirikan tanggal 29 Maret 1961 dengan nama Perusahaan Negara (PN) "Widjaja Karja" dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama *Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co.* yang telah dikenakan nasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. Kemudian tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1972 Perusahaan ini dinamakan PT Wijaya Karya.

WIKA memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan WIKA adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, *engineering procurement*, *construction*, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan. Pada tanggal 11 Oktober 2007, WIKA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham WIKA

(IPO) kepada masyarakat atas 1.846.154.000 lembar saham seri B baru, dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan harga penawaran Rp420,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2007.(www.wika.co.id)

12. Waskita Karya (Persero) Tbk

Waskita Karya (Persero) Tbk didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya tanggal 01 Januari 1961 dari perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Waskita Karya adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan Waskita Karya adalah pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi Enginering, Procurement and Construction (EPC).

Pada tanggal 10 Desember 2012, WSKT memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham WSKT (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.082.315.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham saham dengan harga penawaran Rp380,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Desember 2012. Pemegang saham mayoritas Waskita Karya

(Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 66,04%. Waskita memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Waskita Beton Precast Tbk. (www.wakita.co.id)

C. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang berhubungan dengan data dari variabel-variabel dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan (financial report). Variabel-variabel tersebut terdiri dari Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM), Ukuran Perusahaan (UP), dan Discretionary Accruals (DA) Berikut disajikan informasi penjelasan variabel data penelitian pada periode antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

a. Dewan Komisaris Independen (DKI)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen pada perusahaan perbankan menyatakan setiap perusahaan perbankan wajib memiliki lebih dari 2 (dua) anggota dewan komisaris, dan wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut (Effendi, 2016:37-38).

Rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa pada perusahaan dengan kode ADHI pada tahun 2012 memiliki dewan komisaris sebanyak 6 orang dan dewan komisaris independen sebanyak 2 orang. Jadi perhitungan proporsi Dewan Komisaris Independen ADHI pada tahun 2012 adalah sebanyak 0,3333 atau 33,33%. Data perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016 (%)

	- 010 (/ 0	,					
NIa	Kode			PDKI (%))	//	Rata-
No	No Kode	2012	2013	2014	2015	2016	rata
1	ADHI	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333
2	ANTM	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333
3	BBNI	57,1428	57,1428	62,5	62,5	62,5	60,3511
4	BBRI	62,5	62,5	62,5	62,5	55,5556	61,1111
5	BMRI	57,1428	57,1428	57,1428	50	50	54,2856
6	JSMR	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333
7	KAEF	40	40	40	20	20	32
8	PTPP	33,3333	40	40	33,3333	33,3333	36
9	SMGR	50	33,3333	33,3333	28,5714	28,5714	34,7619
10	TLKM	40	33,3333	42,8571	42,8571	42,8571	40,3809
11	WIKA	33,3333	33,3333	40	28,5714	28,5714	32,7619
12	WSKT	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333
	Nilai ertinggi	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	

Lanjutan Tabel 4.1

	PDKI (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016			
Nilai Terendah	33,3333	33,3333	33,3333	20	20			
Rata-Rata	42,2321	40,8432	42,6388	38,4722	37,8935			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat satu perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian belum memenuhi aturan dari OJK untuk memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen minimal 30%. Hasil ini dibuktikan dari nilai terendah proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 20% yaitu pada Kimia Farma (persero) tbk. pada periode 2015-2016. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris tertinggi periode 2012-2016 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. sebesar 61,11111%. Jumlah dewan komisaris independen di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tidak memiliki batas maksimal, akan tetapi tidak boleh kurang dari 30% dari jumlah dewan komisaris di perusahaan tersebut.

b. Dewan Direksi (DD)

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perusahaan, pengelolaan kinerja, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar perusahaan. Perusahaan terbuka diwajibkan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih. Dewan direksi juga diharuskan memperhatikan kepentingan dari seluruh

pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan (Effendi, 2016: 29-30).

Cara mengukur dewan direksi pada perusahaan adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Pada kode perusahaan ADHI pada tahun 2012 memiliki 5 orang dewan direksi. Data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Dewan Direksi (DD) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Dewan Direksi Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode	0	SD	D (Orang)	14/		Rata-rata	
110	Kode	2012	2013	2014	2015	2016	(dibulatkan)	
12	ADHI	5	5	6/1	6	6	6	
2	ANTM	6	6	6	6	6	6	
3	BBNI	10	10	10	9	10	10	
4	BBRI	11	11	G 118	11	11	11	
5	BMRI	11	11	<u> </u> 11	11	10	11	
6	JSMR	5	5	5	6	6	5	
7	KAEF	5	5	5	5	5	5	
8	PTPP	5	5	6	6	6	6	
9	SMGR	7	7	6	7	7	7	
10	TLKM	8	8	8	8	7	8	
11	WIKA	6	6	6	7	6	6	
12	WSKT	6	6	6	6	6	6	
Nila	ai Tertinggi	11	11	11	11	11		
Nila	ai Terendah	5	5	5	5	5		
	Rata-Rata ibulatkan)	7	7	7	7	7		

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 2 perusahaan BUMN dengan nilai rata-rata jumlah dewan direksi terendah yaitu Kimia Farma (persero) Tbk. dan Jasa Marga Tbk. dari periode 2012-2016 sejumlah lima (5) orang. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. dan Bank Mandiri (persero) Tbk. memiliki nilai rata-rata jumlah dewan direksi tertinggi selama lima tahun sebesar 11 (sebelas) orang. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian telah memenuhi peraturan UU Perseroan Terbatas dan sejalan dengan Peraturan OJK no 35 2014 yang menetapkan jumlah dewan direksi minimal 2 (dua) orang atau lebih.

c. Komite Audit (KA)

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, di mana setidaknya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Rumus untuk menghitung komite audit dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

Komite Audit = Komisaris independen dalam komite audit

Total komite audit

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui bahwa kode perusahaan ADHI pada tahun 2012 memiliki jumlah komite audit dalam perusahaan sebanyak 3 orang. Sedangkan komisaris independen yang mempunyai jabatan dalam komite audit adalah 1 orang, sehingga dapat diketahui proporsi Komite

Audit Independen adalah sebesar 0,3333 atau 33,33%. Data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Komite Audit (KA) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Komite Audit Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

No	Kode			KA (%)			Rata-
NO	Koue	2012	2013	2014	2015	2016	rata
1	ADHI	33,3333	33,3333	50	33,3333	33,3333	36,6667
2	ANTM	16,6667	16,6667	25	25	25	21,6667
3	BBNI	25	33,3333	33,3333	50	33,3333	35
4	BBRI	37,5	37,5	50	75	50	50
5	BMRI	33,3333	33,3333	50	40	33,3333	38
6	JSMR	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333	33,3333
7	KAEF	33,3333	33,3333	33,3333	25	0	25
8	PTPP	25	25	25	0	33,3333	21,6667
9	SMGR	25	25	25	25	25	25
10	TLKM	33,3333	40	60	50	33,3333	43,3333
11	WIKA	40	40	33,3333	0	25	27,6667
12	WSKT	25	25	25	25	25	25
	Nilai rtinggi	40	40	60	75	50	
	Nilai rendah	16,6667	16,6667	25	0	0	
Ra	ta-Rata	30,0694	31,3194	36,9444	31,8055	29,1667	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata jumlah komite audit terendah dimiliki oleh dua (2) perusahaan BUMN yaitu Perusahaan Pembangunan (persero) Tbk. dan PT Aneka Tambang (persero) Tbk. dengan nilai rata-rata 21,6667%. PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk. memiliki nilai rata-rata jumlah komite audit tertinggi sebesar 43,3333%.

d. Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi mampu menurunkan biaya keagenan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No..../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Rumus untuk menghitung kepemilikan manajerial dalam perusahaan adalah:

Berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan dengan kode ADHI pada tahun 2012 memiliki 100% jumlah seluruh saham yang beredar, sedangkan jumlah kepemilikan manajer dalam saham tersebut sebanyak 0,05%. Jumlah kepemilikan manajerial saham ADHI tahun 2012 sebanyak 0,0005 atau 0,05%. Data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Kepemilikan Manajerial (KM) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4 Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

NT-	Vada			KM (%)	ζΜ (%)			
No	Kode	2012	2013	2014	2015	2016	rata	
1	ADHI	0,05	0	0	0	0	0,01	
2	ANTM	65	65	65	65	65	65	
3	BBNI	0,23	0,22	0,21	0,02	0	0,136	
4	BBRI	0	0	0	0	0	0	

Lanjutan Tabel 4.4

No	Kode			KM (%)			Rata-
No	Koue	2012	2013	2014	2015	2016	rata
5	BMRI	0	0	0	0	0	0
6	JSMR	0	0,01	0	0	0	0,002
7	KAEF	0	0	0	0	0	0
8	PTPP	0	0	0	0	0	0
9	SMGR	0	0	0	0	0	0
10	TLKM	0	0	0	0	0	0
11	WIKA	0,42	0,22	0,08	0,08	0,01	0,162
12	WSKT	0	0	0	0	0	0
Nilai T	ertinggi	65	65	65	65	65	
Nilai Te	erendah	0	0	80	0	0	
L	-Rata	5,475	5,454	5,440	5,425	5,417	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata presentase kepemilikan manajerial terendah dimiliki oleh beberapa perusahaan dengan kode BBRI, BMRI, KAEF, PPTP, SMGR, TLKM dan WSKT dengan nilai 0%. Wijaya Karya Tbk (BBRI) memiliki nilai rata-rata presentase kepemilikan manajerial tertinggi selama lima tahun periode 2012-2016 sebesar 0,162%. Berdasarkan hasil tersebut, dari 12 perusahaan sampel BUMN hanya 5 (lima) perusahaan mempunyai kepemilikan manajer. Rata-rata nilai kemilikan manajerial tersebut menunjukkan besarnya % (persentase) saham yang dimiliki oleh para manajer perusahaan. Besarnya saham yang dimiliki manajer menunjukan pula besarnya deviden yang akan manajer peroleh.

e. Ukuran Perusahaan (UP)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 perusahaan dapat diklasifikan dalam 4 kategori menurut ukurannya, yaitu : usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Hal ini didasarkan pada total aset yang dimiliki

dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = LN (Total asset)

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa kode perusahaan ADHI pada tahun 2012 memiliki total aset Rp 7.872.073.635.468, sehingga Ln Total aset adalah 29,69434263. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Ukuran Perusahaan (UP) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Ukuran Perusahaan Sampel Tahun 2012-2016

NT-	17.1			UP (Rupia	h)		Rata-
No	Kode	2012	2013	2014	2015	2016	rata
1	ADHI	29,69434	29,90530	29,97847	30,45007	30,631513	30,13194
2	ANTM	23,70431	23,80815	23,81631	24,13628	24,12384	23,91778
3	BBNI	19,62456	19,7730	19,84757	20,04716	20,21748	19,90196
4	BBRI	20,12785	20,25502	20,50259	20,59364	20,72690	20,44120
5	BMRI	20,27010	20,41279	20,56665	20,62902	20,76124	20,52796
6	JSMR	23,93223	24,05756	24,18455	24,32672	24,70295	24,2408
7	KAEF	28,3616	28,5360	28,71897	28,86500	29,15980	28,72828
8	PTPP	29,77705	30,14998	30,31061	30,58379	31,07248	30,37878
9	SMGR	24,00339	24,15054	24,25883	24,36487	24,51259	24,25805
10	TLKM	25,43611	24,22205	24,24260	25,83629	25,91405	25,13022
11	WIKA	23,11616	23,25656	23,49053	23,69891	24,16036	23,54450
12	WSKT	29,75522	29,80444	30,16010	31,04246	31,74884	30,50221
Nila	i Tertinggi	29,77705	30,14998	30,31061	31,04246	31,74884	
Nila	i Terendah	19,62456	19,7730	19,84757	20,04716	20,21748	
R	ata-Rata	24,81691	24,86095	25,00648	25,38118	25,64434	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata Ukuran Perusahaan terendah (terkecil) dimiliki oleh perusahaan BNI (Persero) Tbk yaitu Rp1.990.196.494. Perusahaan Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki nilai rata-rata ukuran perusahaan tertinggi (terbesar) selama lima tahun periode

2012-2016 sebesar Rp3.050.221.737. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang besar cenderung memiliki stabilitas perusahaan yang baik sehingga akan menarik investor dalam maupun luar negeri.

f. Discretionary Accruals (DA)

Discretionary Accruals (DA) adalah akrual yang nilainya ditentukan oleh kebijakan manajer. Konsep discretionary accruals memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Rumus untuk mengukur discretionary accruals dalam perusahaan BUMN adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{its}$$

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa pada kode perusahaan ADHI pada tahun 2012 mempunyai nilai total akrual perusahaan sebesar -0,035969837 dan mempunya nilai akrual non diskresioner sebesar -1,50363059. Jadi nilai *discretionary accruals* sebesar 1,467660749. Data lebih lengkap disajikan dalam lampiran. Berikut disajikan deskripsi dari variabel Ukuran Perusahaan (UP) sampel perusahaan BUMN periode 2012-2016 pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6 Discretionary Accruals Sampel Tahun 2012-2016

				_			
No	Kode		Rata-				
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata
1	ADHI	1,4676	-8,6420	2,0100	2,2952	0,6931	-0,4362
2	ANTM	15,6666	-1,2899	2,9167	-1,7020	-2,3789	2,6423
3	BBNI	18,3764	21,7761	5,3796	16,5775	17,9008	16,0017
4	BBRI	27,4252	22,1375	14,0342	12,2776	12,5053	17,6748

Lanjutan Tabel 4.6

No	Kode		Rata-				
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata
5	BMRI	18,9472	18,3356	10,9125	10,4970	10,0088	13,7398
6	JSMR	-5,0457	5,1290	-5,0868	-1,5895	30,9032	4,8621
7	KAEF	2,4343	5,4238	-5,2856	-0,7596	4,3709	1,2367
8	PTPP	4,6117	0,0923	4,9519	2,7262	11,4720	4,7708
9	SMGR	-12,2654	0,0311	0,7676	5,1709	2,6917	-0,7207
10	TLKM	-6,4473	-3,3023	-2,6770	-3,5176	-7,6528	-4,7194
11	WIKA	-2,9103	-3,3223	3,3481	6,4926	0,0986	0,7413
12	WSKT	11,5239	3,0773	6,2903	-5,4768	-9,1863	1,2455
Nilai Tertinggi		27,4252	22,1375	14,0342	16,5775	30,9032	
Nilai Terendah		1,4676	0,0311	0,7676	-0,7596	0,6931	
Rata-rata		6,148525	4,95375	3,129725	3,5821	5,952025	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata *Discretionary Accruals* (DA) terendah dimiliki oleh perusahaan dengan kode ADHI yaitu -0,4362. Nilai ini berarti perusahaan tetap melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba sebesar -0,4362, namun nilai ini yang paling kecil karena mendekati 0. Perusahaan dengan kode BBRI memiliki nilai rata-rata *Discretionary Accruals* (DA) tertinggi selama lima tahun sebesar 17,6748. Hal ini berarti perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba sebesar 17,6748.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif yang digambarkan dalam deskripsi variabel, analisis statistik inferensial yang termasuk di dalamnya terdapat uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi terhadap data pada variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat data, menjelaskan data dan memuat data dalam bentuk ringkasan dalam penelitian (Sugiyono, 2013:206). Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah data dan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi data. Rata-rata menunjukkan kisaran nilai, sedangkan standar deviasi menunjukkan persebaran suatu data terhadap rata-rata, semakin kecil nilai standar deviasi maka nilai data tersebar semakin dekat dengan nilai rata-ratanya, dan sebaliknya semakin besar nilai standar deviasi maka nilai data tersebar semakin jauh dengan nilai rata-ratanya.

Adapun analisis deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDKI	60	20	62.5	40,4160	11,74309274
DD	60	5	11	7	2,124646863
KA	60	16.6667	40	31,8611	12,62541967
KM	60	0	65	5,4425	18,10896291
UP	60	19,6245	31,7488	25,1419	3,821733529
DA	60	0,0311	30,9032	4,7535	9,378578131

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS 24, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui deskripsi untuk masing-masing variabel dalam penelitian. Variabel didalam penelitian ini adalah PDKI, DD, KA, KM, UP dan DA. Nilai N atau jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 60 data. Jumlah data berasal dari 12 perusahaan BUMN selama lima tahun periode 2012-2016.

PDKI atau Proporsi Dewan Komisaris Independen adalah salah satu variabel independen ada dalam penelitian. Proporsi Dewan Komisaris Independen menunjukkan hasil perbandingan proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel PDKI adalah sebesar 20% dan nilai maksimum sebesar 62,5%. Nilai rata-rata PDKI sebesar 40,41601% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 11,74309274%. Nilai variabel PDKI memiliki persebaran yang cukup baik karena selisih antara nilai rata-rata dan nilai standar deviasi yang cukup jauh.

DD atau Dewan Direksi menunjukkan jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pada hasil statistik deskriptif ini menunjukkan jumlah anggota dewan direksi memiliki nilai minimum sebesar lima (5) orang dalam dan nilai maksimum sebesar sebelas (11) orang. Nilai rata-rata dewan direksi adalah sebesar 7 dan yang mana hasil ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan BUMN memiliki jumlah dewan direksi tujuh orang dan telah memenuhi peraturan OJK. Menurut peraturan OJK perusahaan BUMN minimal memiliki tiga orang dewan direksi. Nilai standar deviasi dewan direksi sebesar 2,124646863 menunjukkan variabel DD memiliki persebaran cukup baik.

KA atau Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.7 presentase variabel komite audit dihitung berdaarkan jumlah komisaris independen dalam komite audit dibanding dengan total komite audit dalam perusahaan. KA memiliki nilai minimum sebesar 16,6667% dan nilai maksimum sebesar 40%. Nilai rata-rata variabel KA adalah sebesar 31,8611% yang menjelaskan bahwa rata-rata komite audit dalam perusahaan BUMN sudah lebih dari 30% dan sesuai dengan peraturan OJK. Nilai standar deviasi variabel KA sebesar 12,62541967 menunjukkan bahwa variabel KA memiliki persebaran yang cukup baik.

KM atau presentase Kepemilikan Manajerial menunjukkan tingkat kepemilikan saham oleh manajer dari jumlah seluruh saham yang beredar di dalam perusahaan BUMN tersebut. Berdasarkan Tabel 4.7 variabel KM memiliki nilai minimum sebesar 0% yang artinya terdapat manajer yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan BUMN tersebut. Nilai maksimum sebesar 65%. Nilai rata-rata variabel KM sebesar 5,4425% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 18,10896291%. Hasil nilai rata-rata variabel KM menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahan BUMN memiliki porsi yang tidak terlalu besar sesuai dengan peraturan OJK, yaitu dibawah 10%. Variabel KM memiliki persebaran yang cukup baik.

UP atau Ukuran Perusahaan diukur menggunakan hasil logaritma dari total aset. Berdasarkan Tabel 4.7 variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 19,624564 dan mempunyai nilai maksimum 31,748841.

BRAWIJAY

Nilai rata-rata variabel UP sebesar 25,141978 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,821733529. Variabel UP memiliki persebaran yang baik.

DA atau *Discretionary Accrual* adalah salah satu proyeksi manajemen laba melalui aktivitas riil dengan menggunakan *Modified Jones Model* sebagai teknik analisis data. Tabel 4.7 menunjukkan nilai minimum variabel DA sebesar 0,0311 dan nilai maksimum sebesar 30,90328. Nilai rata-rata variabel DA sebesar 4,753523541 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 9,378578131. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata perusahaan BUMN melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba. Nilai standar deviasi variabel DA memiliki persebaran yang cukup baik.

2) Analisis Statistik inferensial

Analisis Statistik Inferensial digambarkan sebagai metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel yang digunakan untuk penggeneralisasian pada populasi. Penggunaan statistik inferensial didasarkan pada peluang (*probability*) dan sampel yang dipilih secara acak (Sugiyono, 2013:207). Penelitian ini pada analisis statistik inferensial digambarkan melalui uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

Di dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel independen, kontrol dan dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Model regresi pertama adalah model regresi untuk variabel independen sebelum adanya variabel kontrol dan model regresi kedua adalah variabel independen setelah adanya variabel kontrol.

BRAWIJAY

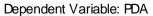
a) Uji Asumsi Klasik

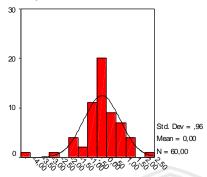
Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi persyaratan lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Persyaratan yang harus ditempuh untuk lolos uji asumsi klasik diantaranya harus lolos uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, dan uji autokorelasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) yaitu: Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KI), Ukuran Perusahaan (UP) dan *Discretionary Accruals* (DA).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan di dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram, grafik normal propability plot (P-Plot) dan analisis statistik uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada cara pengujian uji normalitas pertama menggunakan grafik histogram, Berikut ditampilkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dengan grafik histogram pada Gambar 4.1.

Histogram





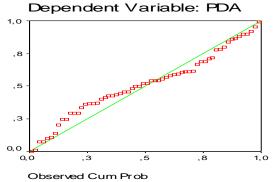
Regression Standardized Residual
Gambar 4.1 Grafik Histogram

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Gambar 4.1 grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang berbentuk lonceng dan melenceng ke kanan. Jika grafik berbentuk seperti lonceng maka dapat dikatakan data variabel terdistribusi normal. Pola tersebut menunjukkan data yang diteliti terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam pengujian model selanjutnya. Pengujian uji normalitas kedua dengan melihat grafik *Normal Propability Plot* (P-Plot). Berikut hasil uji normalitas yang ditampilkan dengan grafik *Normal Propability Plot* (P-Plot) pada

Gambar 4.2

Normal P-P Plot of Regression Sta



Gambar 4.2 Grafik *Normal Probability Plot* Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dianggap tidak normal. Pengujian uji normalitas ketiga dilakukan untuk lebih meyakinkan atas hasil dua grafik diatas. Pengujian uji normalitas ketiga dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) seperti dijelaskan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

17.2 E		Unstandardiz ed Residual
N	·III A IEN	60
Normal Parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,58820301
Most Extreme	Absolute	,120
Dif f erences	Positive	,100
	Negativ e	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		,929
Asy mp. Sig. (2-tailed)		,353

a. Test distribution is Normal.

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* apabila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 4.8, hasil pengujian menunjukkan probabilitas sebesar 0,353 yang

b. Calculated from data.

berarti dapat disimpulkan nilai residual data terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan membuktikan apakah terjadi korelasi antar varaibel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Multikolinieritas dapat terdeteksi dengan melihat reaksi atau gejala dalam perhitungan statistik, yaitu jika nilai tolerance lebih besar $\geq 0,1$ dan nilai Variance $Inflation\ Factor\ (VIF)\ kurang\ dari\ atau\ sama\ dengan <math>\leq 10$ maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Berikut ditampilkan hasil pengujian uji multikolinearitas pada Tabel 4.9 :

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

		Collinearity Statistics		
Model		Tolerance	VIF	
1	PDKI	,925	1,081	
	PDD	,873	1,145	
	PKA	,876	1,142	
	PKM	,943	1,060	
	PUP	,980	1,020	

a. Dependent Variable: PDA Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui nilai *tolerance* dan VIF pada masing-masing variabel independen dan variabel kontrol. Nilai *tolerance* variabel PDKI sebesar 0,925; variabel PDD sebesar 0,873;

variabel PKA sebesar 0,876; variabel KM sebesar 0,943;dan variabel UP sebesar 0,980; sebesar 0,291. Nilai VIF variabel PDKI sebesar 1,081; variabel DD sebesar 1,145; variabel PKA sebesar 1,142; variabel KM sebesar 1,060; dan variabel UP sebesar 1,020. Nilai tolerance keempat variabel independen dan satu variabel kontrol masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0,1, sedangkan untuk nilai VIF masing-masing memiliki nilai lebih kecil atau tidak melebihi 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian model regresi 1 ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

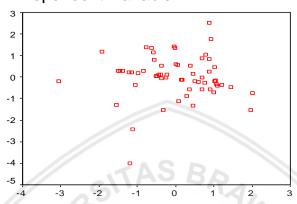
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi kesamaan (bersifat homogen) atau terdapat ketidaksamaan (bersifat heterogen) variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila data bersifat heterogen, maka model regresi tidak mampu meramalkan dengan akurat dikarenakan memiliki nilai residual yang tidak teratur. Jika terdapat pola khusus seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur maka menunjukkan terjadinya heteroskedastitas. Jika tidak terdapat pola khusus yang teratur, dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka pola tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastitas. Analisis uji heteroskedastitas melalui grafik *Scatter Plot* yang dari nilai ZPRED (nilai prediksi, sumbu X) dan nilai SRESID (nilai

residual, sumbu Y) seperti dijelaskan pada Gambar 4.3 berikut di bawah ini :

Scatterplot

Dependent Variable: PDA



Regression Standardized Predicted Value **Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas** *Scatterplot*Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 4.3 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada Model Regresi ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar variabel antara kesalahan pengganggu periode t (periode tertentu) dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (periode sebelumnya) (Ghozali, 2016: 107). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Durbin Watson*. Pengujian menggunakan

Durbin Watson yang dijelaskan pada Tabel 4.10 Model Regresi di bawah ini :

Tabel 4.10 Model Regresi

Model Summary^b

	Durbin-W
Model	atson
1	1,771 ^a

a. Predictors: (Cons

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (d) adalah sebesar 1,771. Syarat model regresi yang baik adalah tidak mengalami masalah autokorelasi, jika du < d < 4-du. Penelitian ini diketahui nilai dL dan dU dengan k'= 5 dan n = 60. Pada tabel *Durbin Watson* (t-tabel) nilai dL yaitu sebesar 1,4083 dan nilai dU sebesar 1,7671. Berdasarkan hasil uji *Durbin Watson*, maka diperoleh hasil 1,7671 (dU) < 1,771 (d) < 2,2329 (4-dU). Hasil ini menunjukkan nilai DW (d) terletak diantara dU dan 4-dU yang dapat disimpulkan bahwa Model Regresi pada penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependenden mengetahui besarnya nilai dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam periode penelitian tersebut. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian

ini menggunakan 2 (dua) macam model regresi. Analisis regresi linier berganda model pertama digunakan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap variabel dependen manajemen laba yang diproksikan dengan variabel dependen *Discretionary Accruals* (DA). Analisis regresi linier berganda model kedua digunakan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM), variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan (UP) terhadap variabel dependen manajemen laba yang diproksikan dengan variabel dependen *Discretionary Accruals* (DA).

1) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1

Berikut disajikan hasil regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 1
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-20,442	3,056		-6,689	,000
	PDKI	,286	,114	,342	2,500	,015
	PDD	1,753	,579	,372	3,025	,004
	PKA	,030	,013	,223	2,340	,023
	PKM	,111	,045	,195	2,490	,016

a. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.11 , secara sistematis hasil analisis regresi linier berganda model regresi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persamaan dari regresi linier berganda Model Regresi 1 adalah sebagai berikut:

Berikut interprestasi dari hasil persamaan untuk Model Regresi 1:

1. α = nilai konstanta sebesar -20,442

Nilai konstanta persamaan ini bersifat negatif, nilai konstanta yang bersifat negatif menunjukkan bahwa variabel dependen Y *Discretionary Accruals* (DA) akan berkurang secara konstan jika varabel lainnya yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM) bernilai nol (0). Nilai α menunjukkan apabila tidak ada variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM) maka nilai *Discretionary Accruals* (DA) sebesar 20,442.

2. $B_1X_1 = 0.286 \text{ PDKI}$

Nilai koefisien regresi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah sebesar 0,286. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Discretionary*

Accruals (DA) akan naik sebesar 0,286 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap Discretionary Accruals (DA). Semakin besar nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka nilai DA semakin tinggi.

3. $B_2X_2 = 1,753 \text{ PDD}$

Nilai koefisien regresi variabel Dewan Direksi (DD) adalah sebesar 1,753. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Dewan Direksi (DD) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 1,753, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Dewan Direksi (DD) terhadap *Discretionary Accruals* (DA) . Semakin besar nilai Dewan Direksi, maka nilai DA semakin tinggi.

4. $B_3X_3 = 0.030 \text{ PKA}$

Nilai koefisien variabel Komite Audit (KA) adalah sebesar 0,030. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Komite Audit (KA) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,030, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positf yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Komite Audit (KA)

terhadap *Discretionary Accruals* (DA) Semakin besar nilai Komite Audit, maka nilai *Discretionary Accruals* (DA) semakin tinggi.

5. $B_4X_4 = 0,111 \text{ PKM}$

Nilai koefisien variabel Kepemilikan Manajerial (KM) adalah sebesar 0,111. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Manajerial mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,111, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Semakin besar nilai kepemilikan manajer, maka nilai DA semakin tinggi.

2) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2

Analisis regresi linier berganda model 2 menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berikut disajikan hasil regresi linier berganda pada Tabel 4.12 :

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi 2
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-38,660	11,544		-3,349	,001
	PDKI	,303	,113	,362	2,679	,010
	PDD	2,303	,663	,489	3,475	,001
	PKA	,034	,013	,254	2,646	,011
	PKM	,127	,045	,222	2,813	,007
	PUP	,528	,323	,195	1,635	,108

a. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.12, secara sistematis hasil analisis regresi linier berganda model regresi 2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persamaan dari regresi linier berganda Model Regresi 1 adalah sebagai berikut:

Berikut interprestasi dari hasil persamaan untuk Model Regresi 2:

1. α = nilai konstanta sebesar -38,660

Nilai konstanta persamaan ini bersifat negatif, nilai konstanta yang bersifat negatif menunjukkan bahwa variabel dependen Y *Discretionary Accruals* (DA) akan berkurang secara konstan jika varabel lainnya yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM), dan Ukuran Perusahaan (UP) bernilai nol (0). Nilai α menunjukkan apabila tidak ada variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Ukuran Perusahaan (UP) maka nilai *Discretionary Accruals* (DA) sebesar 38,660.

2. $B_1X_1 = 0.303 \text{ PDKI}$

Nilai koefisien regresi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah sebesar 0,303. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,303 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Semakin besar nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka nilai DA semakin tinggi.

3. $B_2X_2 = 2,303 \text{ PDD}$

Nilai koefisien regresi variabel Dewan Direksi (DD) adalah sebesar 2,303. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Dewan Direksi (DD) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 2,303, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Dewan Direksi (DD) terhadap *Discretionary Accruals* (DA) . Semakin besar nilai Dewan Direksi, maka nilai DA semakin tinggi.

4. $B_3X_3 = 0.034 \text{ PKA}$

Nilai koefisien variabel Komite Audit (KA) adalah sebesar 0,034. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Komite Audit (KA) mengalami peningkatan sebesar satu satuan orang (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,034, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positf yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Komite Audit (KA)

BRAWIJAY

terhadap *Discretionary Accruals* (DA) Semakin besar nilai Komite Audit, maka nilai *Discretionary Accruals* (DA) semakin tinggi.

5. $B_4X_4 = 0,127 \text{ PKM}$

Nilai koefisien variabel Kepemilikan Manajerial (KM) adalah sebesar 0,127. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Manajerial mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,127, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Semakin besar nilai kepemilikan manjer, maka nilai DA semakin tinggi.

6. $B_5X_5 = 0.528 \text{ PUP}$

Nilai koefisien variabel kontrol Ukuran Perusahaan (UP) adalah sebesar 0,528. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila Ukuran Perusahaan mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1), maka *Discretionary Accruals* (DA) akan naik sebesar 0,528, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa terjadi pengaruh positif antara Ukuran Perusahaan (UP) terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Semakin besar nilai ukuran perusahaan, maka nilai DA semakin tinggi.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah untuk memutuskan apakah hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 1

a) Koefisien Determinasi (R²) Model Regresi 1

Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi Adjusted R square (adjusted R²). Pemakaian nilai Adjusted R square (adjusted R²) dapat mengevaluasi model regresi terbaik karena adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2015:95). Nilai koefisien determinasi bernilai 0 sampai 1. Nilai keofisien determinasi yang mendekati 1 menandakan bahwa varaibel independen mampu menerangkan variabel bebas semakin baik. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Model Regresi 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,820 ^a	,672	,648	6,130973

a. Predictors: (Constant), PKM, PDD, PKA, PDKI

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* adjusted R²) sebesar 0,648 atau 64,8%. Hasil menunjukkan bahwa

Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh 64,8% terhadap *Discretionary Accruals* (DA), sedangkan sisanya sebesar 35,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk didalam model yang tidak masuk model dalam penelitian ini.

b) Uji Statistik F Model Regresi 1

Uji statistik F dilakukan untuk menguji signifikansi dari koefisien determinasi yang menggambarkan adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji F dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan apabila hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0.05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebelumnya, mencari nilai F_{tabel} terlebih dahulu dengan rumus $F_{tabel} = k$; n-k (4; 60-4) maka $F_{tabel} = 4$; 56, sehingga dapat dilihat pada tabel F nilai dari 4; 56 adalah sebesar 2,54. Berikut adalah hasil uji F Model Regresi 1 yang dijelaskan pada Tabel 4.14 di bawah ini :

Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 1

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4229,700	4	1057,425	28,131	,000 ^a
	Residual	2067,386	55	37,589		
	Total	6297,086	59			

a. Predictors: (Constant), PKM, PDD, PKA, PDKI

b. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.14, diperoleh hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 28,131 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} untuk penelitian ini adalah sebesar 2,54 sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi hasil uji $F_{tabel} < 0,05$. Hasil ini menerangkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dalam uji hipotesis ini dapat dinyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), dan Kepemilikan Manajerial (KM) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima

c) Uji Statistik t (Uji Parsial) Model Regresi 1

Uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (variabel independen) secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sebelumnya mencari nilai t_{tabel} dengan rumus $t_{tabel} = t$ ($\alpha/2$; n-k-1) = t (0,05/2; 60 - 4 - 1) = t (0,025; t (55) = 2,004. Berikut adalah hasil uji t model regresi 1 yang dijelaskan pada Tabel 4.15:

Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 1
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-20,442	3,056		-6,689	,000
	PDKI	,286	,114	,342	2,500	,015
	PDD	1,753	,579	,372	3,025	,004
	PKA	,030	,013	,223	2,340	,023
	PKM	,111	,045	,195	2,490	,016

a. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) yaitu Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial Berikut ini akan dijelaskan pembahasan lebih rinci hasil pengujian masing-masing variabel independen secara parsial:

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Pengujian variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,500 > 2,004). Nilai signifikansi (sig) 0,015 < 0,05 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.

- Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Discretionary Accruals* (DA)
 Pengujian variabel Dewan Direksi terhadap *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,025 > 2,004). Nilai siginifikansi (sig) 0,004 < 0,05 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.
- 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Discretionary Accruals* (DA) Pengujian variabel Komite Audit *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,340 > 2,004). Nilai signifikansi (sig) 0,023 < 0,05 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.
- Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Discretionary Accruals
 (DA)

Pengujian variabel Kepemilikan Manajerial terhadap *Discretionary* Accruals (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,490 > 2,004). Nilai signifikan (sig) 0,016 < 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.

BRAWIJAY

2. Hasil Pengujian Hipotesis Model Regresi 2

a) Koefisien Determinasi (R²) Model Regresi 2

Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (*adjusted* R²). Pemakaian nilai *Adjusted R square* (*adjusted* R²) dapat mengevaluasi model regresi terbaik karena adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi bernilai 0 sampai 1. Nilai keofisien determinasi yang mendekati 1 menandakan bahwa varaibel independen mapu menerangkan variabel bebas semakin baik. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Model Regresi 2 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,658	6,039851

a. Predictors: (Constant), PUP, PKM, PKA, PDKI, PDD

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (adjusted R²) sebesar 0,658 atau 65,8%. Hasil menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol maka mengalami kenaikan menjadi 65,8% terhadap *Discretionary Accruals* (DA), sedangkan sisanya sebesar 34,2% sisanya

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk didalam model yang tidak masuk model dalam penelitian ini.

b) Uji Statistik F Model Regresi 2

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan melihat signifikansi hasil dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila hasil uji F menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebelumnya, mencari nilai F_{tabel} terlebih dahulu dengan rumus $F_{tabel} = k$; n-k (5; 60-5) maka $F_{tabel} = 5$; 55, sehingga dapat dilihat pada tabel F nilai dari 5; 55 adalah sebesar 2,38. Berikut adalah hasil uji F Model Regresi 2 yang dijelaskan pada Tabel 4.17:

Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik F Model Regresi 2

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4327,177	5	865,435	23,724	,000 ^a
	Residual	1969,909	54	36,480		
	Total	6297,086	59			

a. Predictors: (Constant), PUP, PKM, PKA, PDKI, PDD

b. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.17, diperoleh hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 23,724 dengan nilai signifikansinya sebssar 0,000. Nilai F_{tabel} untuk penelitian ini adalah sebesar 2,38 sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi hasil uji F_{tabel}

< 0,05. Hasil ini menerangkan bahwa $\rm H_0$ ditolak dan $\rm H_a$ diterima, sehingga dalam uji hipotesis ini dapat dinyatakan bahwa Hasil menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.

c) Uji Statistik t Model Regresi 2

Kriteria pengambilan keputusan pada uji t dalam penelitian ini dengan melihat dan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dan melihat signifikansi hasil dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sebelumnya mencari nilai t_{tabel} dengan rumus $t_{tabel} = t$ ($\alpha/2$; n-k-1) = t (0,05/2; t 60 – 5 – 1) = t (0,025; t 54) = 2,004. Berikut adalah hasil uji t Model Regresi 2:

Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik t Model Regresi 2
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-38,660	11,544		-3,349	,001
	PDKI	,303	,113	,362	2,679	,010
	PDD	2,303	,663	,489	3,475	,001
	PKA	,034	,013	,254	2,646	,011
	PKM	,127	,045	,222	2,813	,007
	PUP	,528	,323	,195	1,635	,108

a. Dependent Variable: PDA

Sumber: hasil output SPSS 24, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tetap berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) setelah adanya variabel kontrol Ukuran Perusahaan. Sementara variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Berikut ini akan dijelaskan pembahasan lebih rinci hasil pengujian masing-masing variabel independen secara parsial:

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap
 Discretionary Accruals (DA)

Pengujian variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Discretionary Accruals (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,679 > 2,004). Nilai signifikansi (sig) 0,010 < 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.

- Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Discretionary Accruals* (DA)
 Pengujian variabel Dewan Direksi terhadap *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,475 > 2,004). Nilai siginifikansi (sig) 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.
- 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Discretionary Accruals* (DA) Pengujian variabel Komite Audit *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,646 > 2,004). Nilai signifikansi (sig) 0,011 < 0,05 yang berarti bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.
- Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Discretionary Accruals
 (DA)

Pengujian variabel Kepemilikan Manajerial terhadap *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,813 > 2,004). Nilai signifikan (sig) 0,007 < 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial

- berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) diterima.
- 5. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol Terhadap Discretionary Accruals (DA) .

Pengujian variabel kontrol Ukuran Perusahaan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,635 < 2,004). Nilai signifikan (sig) 0,108 > 0,05 yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) ditolak.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. *Good Corporate Governance* diproksikan oleh variabel proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen diproksikan oleh *Discretionary Accruals*.

Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen
 (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA) dan
 Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Discretionary Accruals
 (DA)

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Discretionary Accruals (DA). Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme Good Corporate Governance memang salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah keagenan yaitu manajemen laba dengan cara kontrak dan pembatasan perilaku opportunistic yang mungkin dilakukan oleh pihak manajer perusahaan sesuai dengan agency theory. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Penelitian (2009)dan Hermanto (2011).tersebut menyebutkan bahwa Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba meskipun memiliki proksi variabel independen yang berbeda dengan penelitian ini.

BRAWIJAYA

2. Pengaruh Secara Parsial Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Discretionary Accruals* (DA)

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa Dewan Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun komposisi Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan BUMN sudah sesuai dengan peraturan OJK, namun Dewan Komisaris Independen belum melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tidak semua dewan komisaris independen melakukan fungsi Corporate Governance dengan baik. Monitoring dan kontrol yang menghalangi manajer mereka lakukukan tidak dapat memaksimalkan kepentingannya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Hal ini sesuai dengan isi agency theory yang di dalamnya menyatakan bahwa pemisahan kewenangan dan kepentingan kepemilikan antara perusahaan dan pengelola perusahaan menimbulkan masalah keagenan.

Hasil penelitian ini bertentangan deengan yang dilakukan oleh Setiawan (2009), Hermanto (2011), Sasono (2011), Klien (2002) dan Bedard *et al* (2004) yang menyatakan bahwa pembentukan dewan

komisaris independen dapat mengurangi praktik manajemen laba. Beberapa perusahaan mengangkat Dewan Komisaris Independen sebagai ketua komite audit. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara awal apabila terdapat kecurangan yang dilakukan perusahaan publik. Semakin banyak pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisari independen, maka transaparsi keuangan akan semakin terjaga sehingga mengurangi kemungkinan menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

3. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Hal ini menjukkan bahwa meskipun keberadaan dewan direksi sudah sesuai dengan peraturan OJK, namun belum bisa mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan BUMN. Peran dewan direksi sebagai pengendali mekanisme perusahaan yang mengkoordinasi tugas antara direksi dan manajer perusahaan belum dilaksanakan secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahadi (2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi yang lebih dari 7 orang tidak dapat berfungsi secara optimal dan akan lebih mudah dikontrol oleh manajer. Hal ini dikarenakan dewan direksi akan

disibukkan dengan masalah koordinasi. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa banyak perusahaan BUMN tahun 2012-2014 memiliki jumlah dewan direksi lebih dari 7 orang. Jumlah dewan direksi yang terlalu banyak akan mengakibatkan banyak perbedaan kepentingan yang tidak selaras satu dengan yang lainnya, sehingga informasi yang asimetris ini akan memberi kesempatan kepada manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba di perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Hermanto (2011) dan Chen dan Zhang (2012) yang menyatakn bahwa dewan direksi mempunyai dampak positif untuk mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Dewan Direksi mengambil keputusan dengan efektif, cepat, tepat dan independen . Independen dalam hal ini berariti tidak mempunyai kepentingan lain yang dapat mengganggu kemampuannya dalam menciptakan *Good Corporate Governance*. Mereka melakukan fungsi sebagai dewan direksi secara mandiri dan kritis terutama untuk mencegah terjadinya manajemen laba oleh pihak manajer perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA). Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan BUMN sudah sesuai dengan peraturan OJK, namun belum mampu mengurangi konflik kepentingan yang mendorong timbulnya praktik

manajemen laba dalam perusahaan BUMN. Hasil penelitian ini sejalan dengan Palestin (2006) yang menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit tidak dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Komite audit hanya dibentuk berdasarkan pemenuhan formalitas regulasi perusahaan. Anggota yang dipilih sebagai komite audit hanya berdasarkan kekerabatan, sehingga tugas dan wewenang yang dilakukan kurang maksimal. Pembentukan komite audit juga hanya untuk memenuhi regulasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengharuskan perusahaan mempunyai komite audit paling sedikit terdiri dari seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum. Berdasarkan syarat ini dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan ahli yang berada di dalam perusahaan,sehingga mereka juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan yang diinginkan dan memberikan banyak peluang untuk melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Abbott *et al* (2004) dan Setiawan (2009) bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam perusahaan. Keberadaan komite audit sesuai dengan Kep.

29/OM/2004 dibentuk untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan yang dapat mewujudkan pengawasan efektif dari komisaris dan dewan pengawas. Kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba dapat diminimalisir karena komite audit juga bekerja secara objektif dan independen.

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa Pengujian variabel Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Hal ini berarti bahwa kepemilikan saham oleh manajer perusahaan belum dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan BUMN secara signifikan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10%.

Kepemilikan manajerial yang tinggi mengakibatkan manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer sehingga akan menimbulkan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) yang menyatakan bahwa

BRAWIJAYA

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Ujhiyanto (2007) dan Panggabean (2011). Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki informasi yang banyak, sehingga cenderung menjadi sorotan, pengamatan maupun penelitian. Para manajer, direksi komisaris maupun pihak lain yang secara aktif terikat dengan pengambilan keputusan perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan tindakan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi, maka manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham. Berdasarkan hal ini, maka adanya kepemilikan manajerial akan mampu menurunkan teori keagenan, sehingga mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh

6. Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Ukuran Perusahaan (UP) terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM) setelah ditambahkan Ukuran Perusahaan (UP) sebagai variabel kontrol, secara simultan tetap berpengaruh signifikan terhadap Discretionary Accruals (DA). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat nilai regresinya semakin tinggi jika dibandingkan belum ada ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Artinya meskipun ukuran perusahaan besar dan menjadi sorotan banyak pihak, namun manajer perusahaan tetap bisa melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan agency theory yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajemen berada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan shareholder. Asimetri informasi yang dimiliki akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui shareholder. Sehingga dalam kondisi semacam ini shareholder seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan.

7. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Dewan Komisaris Independen (PDKI) secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil nya ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja Dewan Komisaris Independen

terhadap praktik manajemen laba dalam perusahaan. Berdasarkan ketentuan dari OJK bahwa jumlah komisaris independen sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris, dewan komisaris independen di perusahaan BUMN selama tahun 2012-2016 sudah memenuhi, yaitu diatas 30%.

Perusahaan BUMN yang diteliti memiliki ukuran yang berbeda, namun hasilnya tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan BUMN yang besar maupun kecil, tetap ada praktik manajemen laba. Artinya, perusahaan tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip *Corporate Governance* dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Panggabean (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya dewan komisaris independen tidak berdampak pada manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Penyebabnya adalah karena dewan komisaris independen tidak menjamin berkurangnya penyimpangan kebijakan manajemen laba yang diterapkan perusahaan.

8. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dalam perusahaan yang besar maupun

kecil tidak dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba dalam perusahaan. Dewan Direksi pada perusahaan BUMN dengan ukuran yang besar maupun kecil dalam penelitian ini, dinilai belum mampu menjalankan tugas dan peran sebagai pengkoordinasi kegiatan manajer dan pengelolaan perusahaan dengan baik sebagai upaya dalam mengurangi dan mencegah praktik manajemen laba.

Jumlah anggota dewan direksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa dalam sebuah perusahaan wajib memiliki minimal 2 orang atau lebih dewan direksi untuk mengelola perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan direksi pada perusahaan BUMN dengan ukuran kecil mapun besar memiliki nilai terendah 5. Hal ini bearti perusahaan konsisten menerapkan komposisi dewan direksi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Namun konsistensi ini belum cukup untuk menjamin tidak adanya praktik manajemen laba.

9. Pengaruh Komite Audit Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan yang mempunyai ukuran besar maupun kecil tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan BUMN. Peran komite audit gagal sebagai

mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal, karena komite audit tidak dapat meningkatkan kualitas dan kinerja keuangan. Adanya komite audit belum mampu melindungi kepentingan para pemegang saham dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer, karena laporan keuangan perusahaan belum sepenuhnya memiliki integritas yang bisa dipertanggungjawabkan.

10. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dalam perusahaan besar maupun kecil tidak dapat mengurangi paktik manajemen laba dalam perusahaan BUMN. Menurut Sugiarto (2009) besar kecilnya kepemilikan manajerial akan menentukan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hal ini karena suatu kebijakan dan keputusan manajer tergantung pada motivasi yang dimiliki. Namun dalam penelitian ini perusahaan BUMN dengan ukuran besar tetapi tidak mempunyai kepemilikan manajerial tetap saja melakukan praktik manajemen laba. Hal ini karena meskipun manajer tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut, namun banyak peluang untuk mengambil kebijakan guna menguntungkan kepentingan pribadi.

BRAWIJAYA

11. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol Terhadap Discretionary Accruals (DA)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel kontrol Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Discretionary Accruals (DA). Hal ini berarti bahwa Perusahaan yang besar belum tentu dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian ini perusahaan dengan ukuran besar (diatas rata-rata) melakukan manajemen laba yang relatif tinggi, sedangkan untuk ukuran perusahaan yang relatif kecil melakukan praktik manajemen laba yang kecil. Hal ini dapat terjadi karena informasi pada perusahaan yang besar maka pengetahuan yang didapatkan oleh perusahaan juga akan semakin banyak, jadi kesempatan untuk melakukan praktik manajemen laba sangat terbuka.

Perusahaan dengan ukuran yang besar mempunyai aktivitas yang kompleks, sehingga mereka akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi laba karena banyak hal yang harus diamati sehingga tidak fokus pada kegiatan manajemen laba saja. Menurut Watt dan Zimmerman (1990) dalam Nurwati dkk (2010) ukuran perusahaan yang besar memiliki biaya politik yang tinggi, sehingga cenderung memilih metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporakan dibandingkan perusahaan kecil. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Scott (2009) dalam Yushita (2010) yaitu faktor yang

mendorong terjadinya laba salah satunya adalah motivasi politis (political motivation). Perusahaan besar yang menguasi hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi.

F. Kontribusi Adanya Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol

Pada penelitian ini keberadaan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempunyai kontribusi meningkatkan nilai koefisien determinasi. Keberadaan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dapat meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya bahwa ukuran perusahaan bisa menjadi pengontrol aktivitas yang ada dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi naik turunnya aktivitas manajemen laba dalam perusahaan. Mekanisme penerapan GCG melalui dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan manajerial dapat menjadi lebih efektif dan efisien, namun dapat juga menjadi lebih buruk. Ukuran perusahaan yang besar maupun kecil akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan para manajer. Jika ukuran suatu perusahaan besar, maka organ internal dalam perusahaan akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena mereka merasa diawasi oleh berbagai pihak. Begitupula dengan perusahaan yang berukuran kecil, akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang terbaik agar para investor melirik

perusahaan tersebut. Namun manajer juga bisa memanfaatkan besar kecilnya ukuran perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Perusahaan yang besar mempunyai masalah yang kompleks, sehingga para organ internal perusahaan tidak hanya fokus pada satu masalah. Hal ini bisa menjadi celah untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan untuk perusahaan kecil, manajer dapat memanfaatkan aktivitas-aktivitas kecil yang sering diabaikan oleh para organ internal perusahaan.

Selain itu ukuran perusahaan juga mempunyai peran meningkatkan nilai t hitung setiap variabel *Corporate Governance* jika dibandingkan pada model regresi tanpa adanya variabel kontrol. Hal ini berarti bahwa perusahaan BUMN dengan ukuran kecil maupun besar tetap memanfaatkan peluang untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan besar memanfaatkan biaya politik yang tinggi, sedangkan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi yang baik agar investor menanamkan modal di perusahaan tersebut. Tindakan perusahaan dengan ukuran besar ini sesuai dengan teori *political motivation*, sedangkan tindakan perusahaan kecil sesuai dengan teori penawaran saham perdana yang dikemukakan Scott (2009) dalam Yushita (2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pada penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan oleh Dewan Komisaris Independen (DKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM), Ukuran Perusahaan (UP). Manajemen laba diproksikan oleh *Discretionary Accruals* (DA). Adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA) dan Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Discretionary Accruals (DA).
- 2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen maka nilai manajemen laba akan semakin besar.
- 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai Dewan Direksi maka nilai manajemen laba akan semakin besar.

BRAWIJAYA

- 4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA). Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai komite audit maka nilai manajemen laba akan semakin besar.
- 5. Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial maka nilai manajemen laba akan semakin besar.
- 6. Pengaruh Secara Simultan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI),
 Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM)
 dan Ukuran Perusahaan (UP) terhadap *Discretionary Accruals* (DA).
- 7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Dewan Komisaris Independen (PDKI) secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa pada perusahaan skala besar maupun kecil semakin tinggi nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen maka nilai manajemen laba akan semakin besar.
- 8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Dewan Direksi secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa pada perusahaan skala besar maupun

kecil semakin tinggi nilai Dewan Direksi maka nilai manajemen laba akan semakin besar.

- 9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa pada perusahaan skala besar maupun kecil semakin tinggi nilai Komite Audit maka nilai manajemen laba akan semakin besar.
- 10. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA) dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Arah koefisien variabel positif, yang berarti bahwa pada perusahaan skala besar maupun kecil semakin tinggi nilai Kepemilikan manajerial maka nilai manajemen laba akan semakin besar
- 11. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa variabel kontrol Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Discretionary Accruals* (DA). Arah koefisien variabel positif, yang artinya jika ukuran perusahaan semakin semakin besar, maka praktik manajemen laba akan semakin besar.

B. Saran

Dari hasil pemaparan keterbatasan yang dapat ditemukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sejenis berikutnya secara umum:

BRAWIJAYA

- 1. Minimnya penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba dalam perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel kontrol yang lain sehingga penelitian akan lebih luas dan kuat.
- 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel independen dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba berarti, semakin banyak jumlah masing-masing variabel independen maka semakin besar pula manajmen laba yang dilakukan perusahaan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat meneliti sejauh mana jumlah variabel independen tersebut akan berbanding lurus dengan manajemen laba. Apakah terdapat batasan jumlah maksimal masing-masing variabel atau tidak.
- 3. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya memakai data sekunder, melainkan data primer perusahaan yang mendukung validitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang, Riyanto. 2008. Dasar-dasar Pembelanjaan. Yogyakarta: BPFE.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Cetakan 1. Jakarta:PT Ray Indonesia.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariet dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdani. 2016. Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, Jogiyanto. 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
- Mallaret. 2008. Berbisnis dengan Osama Mengubah Resiko Global Menjadi Peluang Sukses. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Puradiredja, Kanaka dkk,. 2006. *Manual Komite Audit*. Jakarta: Ikatan Komite Audit Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Siregar, Syofian. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiri, Slamet. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- ______. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta, CV:Bandung.
- Sugiarto. 2009. Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri, Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiawan, Dedhy dkk. 2011. Creative Accounting. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, Sri.2008. Manajemen laba, Teori dan Model empiris. PT Grasindo. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2012. Good Corporate Governance. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hunger, J David dan Wheelen, Thomas. 2003. Manajemen Strategis.
 Yogyakarta: ANDI.
- Zulgenaf. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

SKRIPSI

- Ludmilla, Maudy. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas Perusahaan. Skripsi. Universitas Brawijaya
- Palestin, Halima Shatila. 2006. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik *Corporate Governance* dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sasono, Yoga. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Skripsi. Universitas Jember
- Warmadewa, Bhayangkara. 2010. Analisis Varible Size Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Debt To Equity Ratio (DER) dan Return on Assets (ROA) yang mempengaruhi Praktik Perataan Laba

- Pada Perusahaan Jasa Publik di Indonesia. Tesis. Universitas Jember
- Widiatmaja, Bayu Fatma. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan. Skripsi. Universitas Diponegoro

JURNAL

- Abbot et al. 2004. "Audit commite characteristics and restatements". Auditing: A journal of Practice & Theory, Vol.23 No.1 (69-87).
- Bedard M *et al.* 2004. "The effect of audit commite expertise, independence, and activity on aggressive earnings management". *Auditing: A journal of Practice & Theory*, Vol. 23 No.2 (13-35).
- Chen, A., Kao, L., Tsao, M and Wu, C. 2007. "Building a corporate governance index from the prespective of ownership and leadership for firms in Taiwan". *An International Review*, Vol. 15 pp 61-100.
- Dechow, P.M. et al. 1995. "Detecting Earnings Management". *The Accounting Review*, 2:193-255
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. "The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure." *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360.
- Klein, A. 2006. "Audit Commite, Board of Director Charasteristic and Earning Management". *Jurnal of Accounting and Economics*. Vol 32:375-400
- Nurwati A, et. al. 2010. "Corporate Governance and earnings forecast accuracy". Asian Review of Accounting, Vol 18 Issue 1:50-67.
- Rahadi, Hana Pricilia. 2014. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba Di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 3 No. 10: 1-17
- Raithaha, Mehul dan Surenderrao Komera. 2016. Executive Compensation and Firm Performance: Evidence from india Firms. IIMB Management Review (2016) 28, pp. 160-169

- Rajput, M.S. 2014. "Creative Accounting: Some Aspects Dr. Mahesh Singh Rajput". International Journal Of Business And Administration Research Review, Vol 2(4):193199.
- Rama, Radian Sri. 2012. "Manajemen Laba (Earnings Management) dalam perspektif Etika Hedonisme". Jurnal Akuntansi, Vol 1, No 2: 123-125
- Setiawati, dan Na'im. 2000. "Manajemen Laba". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 15 (4):424-441.
- Sudarmadji, A.M dan Sularto, Lana. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laverage dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. Proceeding Pesat, 2, ISSN: 53-61
- Ujiyantho, A. dan B. A. Pramuka. (2007). "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi X.* Makassar.
- Yushita, Amanita Novi. 2010. Earnings Management Dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. VIII No. 1:53-62.
- Zhang, Y., Zhou, J. And Zhou, N. 2007, "Audit commite quality, auditor independence and internal control weakness". *Journal of Accounting & Public Policy*, Vol 26, No.3 (27-30)

INTERNET

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (<u>www.bumn.go.id</u> ,diakses tanggal 20 Februari 2018)
- Bursa Efek Indonesia (BEI). 2017. (<u>www.idx.co.id</u>, diakses tanggal 2 Januari 2018)
- CG Watch 2016 Ecosystems Matter (<u>www.acga-asia.org</u>) diakses pada tanggal 15 Maret 2018)

Manajemen Jujur Dasar Pelaporan Laba (https://ugm.ac.id/id/berita) diakses pada 20 Mei 2018)

PERATURAN PEMERINTAH

Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006 tentang Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Kep. 29/PM/2004 tentang Komite Audit

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Pengertian Good Corporate Governance

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen Pada Perusahaan Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No..../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

SK Nomor 16/MBU/01/2016 tentang Rencana Strategis Kementrian BUMN tahun 2015-2019

Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 tentang jumlah Komite Audit

Undang-undang Perseroan terbatas pasal 120 ayat (2) tentang pembentukan komisaris independen.

Undang-undang No 19 tahun 2003 pasal 70 tentang Pembentukan Komite Audit

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BRAWIJAY

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Lucky Berliana Ovianti Gmail : Luckyyovianti@gmail.com

Tempat, Tanggal Lahir: Tulungagung, 13 September 1996

Agama : Islam

Nomor Telepon : 085748925728

Alamat : Dsn. Jati, Desa Pandansari

RT. 024, RW. 007 Ngunut

Tulungagung



- 1. 2014 2019 : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- 2. 2011 2014 : SMA Negeri 1 Ngunut
- 3. 2008 2011 : SMP Negeri 2 Ngunut
- 4. 2002 2008 : MIN Pandansari

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. *Organization Manager* (Sekretaris) UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya 2016-2017
- 2. Staff Research and Development UKM Mahasiswa Wirausaha 2015-2016
- 3. Anggota Pers IPPNU Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Ngunut 2013-2014
- 4. Wakil Pradana Putri Ambalan SMAN 1 Ngunut 2012-2013
- 5. Sekretaris Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 1 Ngunut 2012-2013
- 6. Anggota Seksi Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara OSIS SMAN 1 Ngunut 2011-2012
- 7. Pengurus Majalah Dinding SMPN 2 Ngunut 2010-2011
- 8. Ketua seksi bidang kesastraan OSIS SMPN 2 Ngunut 2010-2011
- 9. Pratama Putri Gugus Depan SMPN 2 Ngunut 2010-2011

D. PENGALAMAN MAGANG

 PT. Angkasa Pura Airports Bandara Internasional Juanda Surabaya 20 September s.d. 20 November 2017

E. KEAHLIAN

Microsoft Office (Skor Good Grade TRUST Training Partners)

Demikian Curriculum Vitae yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 29 Juli 2019

Lucky Berliana Ovianti